

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM SERTIFIKASI  
TANAH WAKAF**

*( Studi Kasus Di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang )*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh;  
**ALI MAGHFUR**  
( N I M : 2101069 )

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

Drs. H. Musahadi, M.Ag.  
Jl. Permata Ngaliyan II/62-63 Ngaliyan Semarang.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp :  
Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Ali Maghfur

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ali Maghfur  
NIM : 2101069  
Judul : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM  
SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kasus Di Wilayah KUA Ngaliyan  
Kota Semarang )

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

**Drs. H. Musahadi, M.Ag.**  
NIP. 150 267 754

**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**  
Jl. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp/ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Ali Maghfur  
Nomor Induk Mahasiswa : 2101069  
Judul : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM  
SERTIFIKASI TANAH WAKAF** ( *Studi Kasus Di  
Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang* )

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S-I) tahun akademik 2007/2008

Semarang, 29 Juli 2008.

**Ketua Sidang**

**Sekretaris Sidang**

**Drs. Maksun, M.Ag.**  
**Nip. 150 2630 40**

**Drs. H. Musahadi, M.Ag.**  
**Nip. 150 267 754**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Hj. Rr. Sugiarti, SH., MH.**  
**NIP . 150 104 180**

**Dede Rodin, M.Ag.**  
**Nip. 150 318 015**

**Pembimbing**

**Drs. H. Musahadi, M.Ag.**  
**Nip. 150 267 754**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dan nara sumber yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2008  
Deklarator

Ali Maghfur  
Nim.2101069

## Abstrak

Di wilayah Kota Semarang, hingga bulan Mei 2007 terdapat 1.061.370,4 M2 luas tanah wakaf. Jumlah tanah yang sudah bersertifikat berjumlah 927.407 m2 sementara yang belum memiliki AIW/APAIW sejumlah 33.807M2. Khusus untuk Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terdapat 60.787 m2 luas tanah wakaf. Dari jumlah tersebut terdapat 59.181 M2 luas tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 1.606 M2 luas tanah wakaf masih dalam proses BPN.

Adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat, dikarenakan beberapa hal yakni: Masyarakat kesulitan biaya sertifikasi, Masih ada sebagian masyarakat yang belum percaya kepada pemerintah dalam hal sertifikasi, Koordinasi antara instansi dengan masyarakat belum berjalan dengan baik, Masih ada anggapan sementara bahwa pengurusan sertifikasi oleh instansi terkait belum termasuk hal-hal yang cepat diselesaikan pengurusannya masyarakat

Dari data diatas, ada hal yang menarik dan patut menjadi pertanyaan yakni, bagaimanakah sertifikasi tanah wakaf berjalan di KUA Ngaliyan? Factor-faktor apakah yang mempengaruhi jalannya sertifikasi di KUA Ngaliyan? Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf tersebut?. Paling tidak persoalan ini yang menarik untuk diteliti.

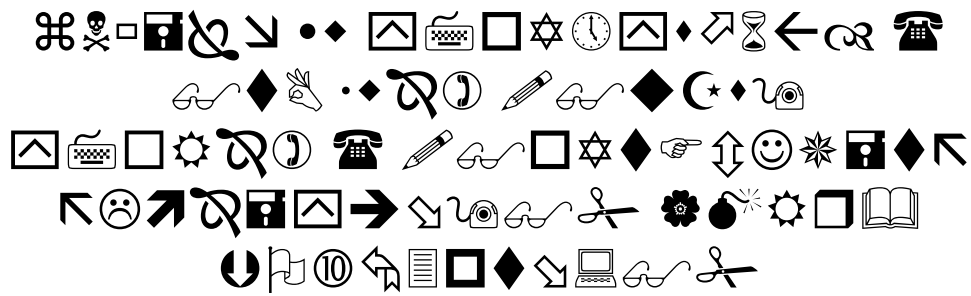
Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berada pada masyarakat di wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang dengan mengfokuskan pada aspek kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf.

Sedangkan data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Sebagai data primer pada penelitian ini adalah Masyarakat yang berada di wilayah KUA Ngaliyan yang terbatas pada masyarakat yang pernah melakukan sertifikasi tanah wakaf, atau masyarakat yang pernah melakukan perwakafan. Sementara data sekundernya adalah sumber-sumber yang relevan dengan bahasan yang peneliti kemukakan, yakni : Peraturan perundang-undangan, buku, artikel. Sementara metode pengumpulan data melalui metode observasi, metode sampel, wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada pengetahuan, pemahaman dan sikap serta pola perilaku masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jalannya sertifikasi tanah wakaf di KUA Ngaliyan, mengetahui factor-faktor yang mempengaruhinya dan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf di Wilayah KUA Ngaliyan.

Menurut penulis pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah wakaf di pengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut : Masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf, Pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, Hukum Sertifikasi tanah merupakan berada pada hukum perdata sehingga peranan hukum dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang di angkat.

Sikap dan pola perikelakuan masyarakat dalam hal ini merupakan sikap dan pola perikelakuan yang berdasar pada hukum islam yang selama ini menjadi kebiasaan dalam melakukan perbuatan. Dan disisi lain sikap dan pola perikelakuan responden merupakan sikap instrumental. Instrumental merupakan sikap yang mempertimbangkan untung dan rugi suatu kaedah hukum

## MOTTO



Artinya : "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs Al-Baqarah :32)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Khadiq dan Ibunda Rofi'ah tercinta, yang telah mengukir jiwa ragaku serta mencurahkan kasih-sayangannya dan memberikan dorongan baik moril maupun materiil, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Adinda Nur Halimah, Sahil Taufiq, Muhawarotul Khasanah, Muhammad Aziz Hidayatullah, Nurul Huda, adik-adikku tersayang yang selalu memberi senyum penyejuk dahaga jiwaku.
3. Bapak H. Musahadi dan Ibu Hj. Mahmudah yang selalu memberikan bimbingan dan saran kepada saya.
4. Bapak H Sutedjo dan Ibu Hj Elliya Fiyanti yang telah memberikan fasilitas dari awal sampai akhir, serta Mbak Dewi Suswiryani yang telah mengingatkan saya.
5. Seluruh Warga Perumahan Permata Ngaliyan Rt 10 & 11 RW 03 Ngaliyan yang selalu memberi saran, canda tawa kepada saya.
6. Segenap Pengurus Ta'mir Musholla Baitussalam yang telah memberikan didikan material dan spiritual kepada saya.
7. Segenap pengurus Rt 10 Perumahan Permata Ngaliyan yang telah memberikan didikan sosial kepada saya dalam bermasyarakat
8. Segenap pengurus Majelis Ta'lim Remaja Baitussalam, pengurus "PERMATA" yang selalu memberikan fasilitas kegiatan pada saya.
9. Saudara Iman Fadhillah yang selalu memberikan saran dan dukungan moril kepada saya, serta teman-teman se-angkatan ( Teddy Kholiluddin, Zarqoni, Wiwit Rizka Fatkhurrahman, Imam Bukhori, Lukman Zein, Muslikhuddin, Joko Mesdi, Nurul Islam, M Taufiq, Khoirul Umam, Umi Hafidhoh, Yani, Sofi, Dyah) dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan.
10. Segenap pengurus PMII Rayon Syari'ah 2002. Segenap Pengurus PMII Komisariat Walisongo Semarang 2004.
11. Segenap pengurus BEM Fakultas Syariah 2004, Segenap pengurus JQH 2003.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena dengan Rahmat, Hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT NGALIYAN DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF” (Studi Kasus Di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang). Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad SAW, yang dalam dirinya senantiasa terdapat tauladan bagi ummatnya.

Penulis yakin bahwa Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun material. Atas segala budi baik yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih. Dalam kesempatan ini secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Musahadi, M.Ag. selaku Pembantu Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dan dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran serta koreksi kepada penulis.
3. Bapak Ahmad Arif Budiman, M.Ag. selaku Kajur , Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Sekjur, Bapak Moh Sho’im, M.Ag. selaku Staf Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah secara ikhlas memberikan ilmunya selama menempuh studi di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
5. Ayahanda Khadiq dan Ibunda Rufia’h serta adik-adikku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil selama belajar di IAIN Walisongo Semarang.
6. Keluarga Bpk H. Sutedjo, keluarga H. Musahadi, Pengurus Rt 10, Pengurus Ta’mir Musholla Baitussalam, dan seluruh Warga Perumahan Permata Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dari awal sampai akhir.

7. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo baik karyawan, teman-teman mahasiswa yang telah ikhlas membantu dan mendorong dalam proses belajar di Fakultas Syari'ah.
8. Iman Fadhillah, S.Hi, Wiwit Rizka, S.Hi, serta kawan-kawan seangkatan yang telah memberikan dorongan kepada penulis.
9. Kecamatan Ngaliyan, KUA Ngaliyan, masyarakat di Kecamatan Ngaliyan yang telah memberi izin, informasi, data-data untuk penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini. Namun tegur sapa, saran dan kritik yang konstruktif selalu penulis harapkan dari berbagai pihak demi kebaikan Skripsi ini dan penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga Allah SWT. membalas budi baik mereka dan menjadikannya sebagai amal jariyah untuk selamanya. Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri dari segala urusan dengan selalu mengharap ridha, ampunan dan petunjuk-Nya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca dan dapat diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah. *Amin.*

Semarang, 15 Juli 2008

Penulis,

Ali Maghfur

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Deklarasi.....	v
Abstrak .....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Halaman Daftar Isi.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan / Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penulisan / Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF**

A. Kerangka Teori Kesadaran Hukum.....	15
B. Hukum Wakaf Dalam Islam.....	26
C. Perwakafan Menurut Hukum Adat.....	40
D. Peraturan Tentang Sertifikasi Tanah dan Tanah Wakaf Di Indonesia... ..	41
E. Perwakafan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf.....	45
F. Sertifikasi Tanah Wakaf.....	48

### **BAB III KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF ( Studi Kasus Di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang )**

A. Profil Masyarakat Ngaliyan.....	55
B. Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Ngaliyan.....	57
C. Factor-faktor yang mempengaruhi jalannya sertifikasi tanah wakaf....	65
D. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf .....	66

### **BAB IV ANALISA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kasus Di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang )**

A. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Ngaliyan.....	77
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf .....	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
--------------------	----

B. Rekomendasi.....	90
C. Penutup .....	91

## Tabel

Hal	
67	Tabel-1: Menurut saudara, apakah ketentuan tentang sertifikasi tanah wakaf diatur dalam peraturan tertulis ?
67	Tabel-2: Sertifikasi tanah wakaf dilakukan berdasarkan apa ?
68	Tabel-3 : Menurut saudara, siapakah yang terlibat dalam ikrar wakaf ?
68	Tabel-4 : Kemanakah saudara membuat akta ikrar wakaf ?
69	Tabel-5: Pengetahuan Hukum Responden
69	Tabel-6 : Ketentuan mengenai sertifikasi tanah wakaf sebaiknya tunduk pada apa ?
70	Tabel-7 : Bagaimanakah untuk mendapatkan bukti AIW ?
70	Tabel-8 : Apakah ada syarat bagi wakif dan saksi dalam ikrar wakaf?
71	Tabel-9: Selain membuat akta ikrar wakaf lembaga ( PPAIW ) tersebut melakukan apa ?
72	Tabel-10 : Pemahaman Hukum Responden
72	Tabel-11: Jika saudara dalam membuat akta ikrar wakaf di tolak oleh PPAIW karena persyaratan tidak lengkap, bagaimana sikap saudara ?
72	Tabel-12 : Apakah saudara setuju bila dalam sertifikasi harus menunjukkan bukti Akta Ikrar Wakaf di samping surat tanah ?
73	Tabel-13 : Apakah saudara setuju terhadap orang yang terlibat terdapat Syarat-syarat ?
73	Tabel-14 : Apakah saudara setuju, wakif harus datang dan berikrar kepada nadzir dihadapan PPAIW dan di saksikan oleh saksi ?
74	Tabel-15: Konsistensi Sikap Hukum Responden
74	Tabel-16 : Apakah saudara sudah pernah melakukan Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW?
75	Tabel-17 : Apakah saudara pernah terlibat dalam ikrar wakaf ?
75	Tabel-18 : Apakah saudara pernah membuat Akta Ikrar Wakaf di KUA ?
76	Tabel-19 : Pola perikelakuan Hukum Responden

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap pemeluk Islam tentu merasakan dan memahami bahwa persoalan hukum adalah sesuatu yang sentral. Setidaknya hal ini tidak bisa terlepas dari sorotan dan timbangan hukum. Daniel Pipes, menegaskan bahwa kunci utama membedakan hukum islam dengan hukum barat adalah "*Who you are, not where you are*"( siapa anda dan bukan dimana anda berada), artinya di manapun orang islam, islam berada, syari'at atau hukum senantiasa "membanyanginya".<sup>1</sup>

Untuk suatu masyarakat yang sedang “membangun”, seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan yang seperti itu, peranan hukum semakin menjadi penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan. Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendali social( social control ) saja, melainkan upaya menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang di cita-citakan.

Meskipun demikian, masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan, pertentangan kepentingan selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Aturan-aturan itu dibuat guna mengatasi pertentangan kebutuhan dasar tadi, dan masyarakat

---

<sup>1</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jogjakarta : Islamika, 2003.

yang tidak mau mengindahkan aturan-aturan tadi berarti tidak memperhatikan hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat.<sup>2</sup>

Fungsi hukum dalam masyarakat menurut Prof. Antonie A.G. Peters terdapat tiga perspektif<sup>3</sup>: *pertama* perspektif control social, *kedua* social engineering, *ketiga* emansipasi masyarakat. Dari tiga perspektif ini yang lebih dekat dengan masyarakat yakni social engineering. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dalam desertasinya, bahwa hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang di inginkan.<sup>4</sup>

Pemikiran tersebut sesuai dengan politik hukum nasional, sebagaimana termuat dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Yang mengemukakan bahwa :<sup>5</sup>

1. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan :

a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi

---

<sup>2</sup> Drs. Dudu Duswara Machmudah, S.H., M.Hum., *Pengantar Ilmu Hukum ( Sebuah Sketssa )* : Refika Aditam, Bandung, 2003, hlm 9-10.

<sup>3</sup> Abdurrahman, S.H., *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Media Sarana Press, 1987, hlm 12.

<sup>4</sup> Sadjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* : Alumni, Bandung, 1979, hlm 142.

<sup>5</sup> Dr. Otje Salman, S.H., *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung : Alumni, Bandung, 1993, hlm 2

hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

- b) Menertibkan lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- c) Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

2. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah kearah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Upaya kodifikasi tersebut sesungguhnya bermaksud mengganti tata hukum yang kini berlaku –yang di buat oleh pemerintah colonial- dengan tata hukum baru yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan usaha ini, timbul masalah, system hukum mana yang mewakili kesadaran hukum masyarakat, yang dapat menjadi sumber utama pembentukan hukum nasional. Hal ini disebabkan, karena hingga saat ini terdapat tiga system hukum yang mempengaruhi atau merupakan sumber dari tata hukum positif Indonesia, yaitu system hukum adat, system hukum islam, dan sistem hukum barat.<sup>6</sup>

Demikian juga hukum wakaf yang ketentuan teknisnya dipengaruhi hukum yang ada pada waktu itu. Dalam usaha pemerintah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi tanah wakaf, membentuk PPAIW meskipun sebenarnya masalah pencatatan/pensertifikasian tanah wakaf lebih dekat diqiyaskan kepada soal utang piutang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>7</sup> Dr. Ahmad Rofiq, M. A., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Gama Media, 2001, hlm

Dalam kaitannya dengan sertifikasi tanah telah diatur dalam undang-undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria dan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran yang tanah telah meletakkan dua kewajiban pokok.<sup>8</sup>

Dalam rangka untuk menertibkan tanah wakaf diatur dalam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP No 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 41/2004, meskipun telah diundangkan, masalah sertifikasi tanah wakaf di Indonesia dalam prakteknya masih sering ditemui tanah wakaf yang tidak disertifikatkan.

Sertifikasi tanah wakaf diperlukan demi tertib administrasi dan kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersama oleh Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahun 2004, kedua lembaga ini mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Proses sertifikasi tanah wakaf dibebankan kepada Anggaran Departemen Agama.

Menurut data Depag tahun 2003 dan diperkuat oleh data **CSRC (Centre for the Study of Religion and Research)** bahwa asset wakaf di seluruh Indonesia adalah 362.471 lokasi dengan total nilai sekitar 590 trilyun<sup>9</sup> Data yang ada di Departemen Agama RI sampai dengan bulan Februari 2003 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia berjumlah 362.471 lokasi dengan luas 1.475.198.580 m<sup>2</sup>, sedangkan tanah wakaf yang sudah bersertifikat 272.351 (75.13%) lokasi, dan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 78.167 (22.%). Padahal tanah wakaf ini merupakan aset umat Islam yang perlu dikelola, dikembangkan, dan didaya gunakan secara profesional dan amanah sehingga

---

<sup>8</sup> Bachtiar Effendi S.H., *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung : Alumni, 1993, hlm 47-48. Kewajiban pokok a) kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah (Pengukuran, pemetaan, pembukuan, peralihan, pemberian surat ), b) kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak-hak atas tanah yang wajib di daftarkan .

<sup>9</sup> Herman Budiyo ( Artikel ; Masa Depan Wakaf Indonesia ), http Net, tanggal 3 Mei 2007



nantinya dapat memberikan kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan yang melanda bangsa Indonesia saat ini.<sup>10</sup>

Sementara di wilayah Kota Semarang, hingga bulan Mei 2007 terdapat 1.061.370,4 M2 luas tanah wakaf. Jumlah tanah yang sudah bersertifikat berjumlah 927.407 m2 sementara yang belum memiliki AIW/APAIW sejumlah 33.807M2. Khusus untuk Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terdapat 60.787 m2 luas tanah wakaf. Dari jumlah tersebut terdapat 59.181 M2 luas tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 1.606 M2 luas tanah wakaf masih dalam proses BPN.<sup>11</sup>

Adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat, dikarenakan beberapa kendala:

1. Terbatasnya dana yang tersedia dalam pembuatan sertifikasi tanah wakaf.
2. Masih ada sebagian masyarakat yang belum percaya kepada pemerintah dalam hal sertifikasi tanah wakaf.
3. Koordinasi antara instansi terkait belum berjalan dengan baik.
4. Ada anggapan sementara bahwa pengurusan sertifikat tanah wakaf oleh instansi terkait Belum termasuk hal-hal yang cepat diselesaikan pengurusannya.<sup>12</sup>

Berangkat dari berbagai fakta dan kendala di atas dan untuk mempermudah proses sertifikasi tanah wakaf sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977, KUA Ngaliyan Kota Semarang telah melakukan sertifikasi tanah wakaf. Sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maupun ketentuan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun sejauh mana program tersebut berjalan dan factor yang mempengaruhinya serta sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf tersebut. Atas dasar itulah penulis mencoba melakukan penelitian

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, 2006, hlm. 132-133

<sup>11</sup> Laporan Pertanggungjawaban KUA Ngaliyan Bulan Januari Tahun 2008

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003, hlm. 1.

tentang kesadaran hukum masyarakat di wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang yang akan penulis tuangkan dalam skripsi ini dengan judul **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF** (*Studi Kasus Di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang*).

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah program sertifikasi tanah wakaf berjalan di wilayah KUA Ngaliyan .
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi jalannya program tersebut
3. Sejauhmana kesadaran hukum masyarakat di wilayah KUA Ngaliyan.
  - a) Sejauhmana Pengetahuan Hukum Masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf
  - b) Sejauhmana Pemahaman Hukum Masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf
  - c) Sejauhmana Sikap Masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf
  - d) Sejauhmana Pola Perikelakuan Masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Setiap penulisan tentu berdasarkan atas maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Maka penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jalannya program sertifikasi di wilayah KUA Ngaliyan.
2. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi jalannya program sertifikasi tanah wakaf di wilayah KUA Ngaliyan
3. Untuk Mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf
  - a. Menilai pengetahuan hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf
  - b. Menilai sejauhmana pemahaman hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf

- c. Menilai sejauhmana sikap hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf
- d. Menilai sejauhmana pola perikelakuan hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka diperlukan dalam rangka memperjelas masalah yang dikaji karena penelitian-penelitian yang serupa sudah pernah ditulis atau dikaji baik yang sudah berbentuk buku maupun dari penelitian. Buku dan hasil penelitian yang secara umum membicarakan Kesadaran Hukum dan sertifikasi tanah wakaf adalah sbb :

Menurut Soerjono Soekanto, dalam buku *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, bahwa kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh empat indikator yang saling berhubungan antara indikator satu dan yang lainnya<sup>13</sup> yakni a. Pengetahuan hukum, b. Pemahaman hukum, c. Sikap hukum, d. Pola perikelakuan hukum.

Dr. R. Otje Salman, SH. Mengatakan bahwa, kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu masyarakat, dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan melainkan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup> Kesadaran hukum dalam penulisan ini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum.

Ronny Hanitidjo Soemitro, S.H., berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap hukum sangat besar mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakart : Rajawali, 1982.

<sup>14</sup> Dr. Otje Salman S.H., *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* : Alumni, Bandung, 1993

<sup>15</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, S.H., *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Remdja Karya, 1985, hlm 29.

Joseph Schacht dalam bukunya *Pengantar Hukum Islam*, yang mengatakan tentang hukum objektif yang menjamin subjektifitas hak-hak individu. sejauh persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh si pemberi wakaf mempunyai kekuatan hukum<sup>16</sup> adanya persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh wakif pada tanah wakaf yang di wakafkan.

H. Abdurrahman, SH,MH., berpendapat bahwa masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di Indonesia pada dasarnya adalah membicarakan masalah pranata hukum yang unik sekaligus rumit.<sup>17</sup>

Dalam buku, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, menjelaskan tentang syarat-syarat wakaf, rukun wakaf, jenis wakaf, dan peraturan perundangan tentang wakaf.<sup>18</sup>

Di dalam *Juklak Pensertifikasian Tanah Wakaf*, membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, yang mengatur tata cara pelaksanaan sertifikasi tanah milik yang sudah bersertifikat, tanah hak milik yang belum bersertifikat (bekas hak milik adat) dan tanah yang belum ada hak miliknya.<sup>19</sup>

Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", yang secara umum mengkaji tentang materi hukum Islam di Indonesia yang meliputi pengertian wakaf, sejarah hukum islam di Indonesia, benda wakaf, pengawasan harta wakaf dan penyelesaian perselisihan harta wakaf.<sup>20</sup>

Dr. H. Imam Suhadi, S.H., "*Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*", yang menguraikan tentang pensertifikatan tanah wakaf, penggunaan tanah wakaf dan

---

<sup>16</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Jogjakarta : Islamika, 2003 .

<sup>17</sup> H. Abdurrahman, S.H., M.H., *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung : PT. Citra Aditiya Bakti, 1994.

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Hukum Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1988 .

<sup>19</sup> Drs. H. Tulus, *Juklak Pensertifikasian Tanah Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 2003

<sup>20</sup> . Drs. Ahmad Rofiq, M. A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, hlm. 490-528.

pengelola tanah wakaf serta faktor atau motivasi yang mendorong perwakafan tanah wakaf.<sup>21</sup>

Usaha untuk melindungi tanah wakaf sangat diperlukan, melindungi disini maksudnya melindungi tanah wakaf dari segi hukum, fisik, komputerisasi, dan melindungi dari bimbingan dan pengawasan tanah wakaf. sehingga tujuan dan manfaat daripada tanah wakaf itu benar terjaga dengan baik.<sup>22</sup>

Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A., *Pendaftaran Tanah Di Indonesai dan Peraturan Pelaksanaannya*, menyatakan tentang perlunya pendaftaran tanah wakaf sebagai upaya melindungi sekaligus bukti telah adanya tanah wakaf sebelum adanya ketentuan pensertifikatan tanah wakaf secara resmi.<sup>23</sup>

Disamping buku-buku diatas, terdapat pula hasil penelitian dalam bentuk skripsi yakni Skripsi Nizar Zulmi yang berjudul *Studi Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Tembalang Kota Semarang*. pada penelitian ini pembahasannya berbeda dari pembahasan yang peneliti lakukan, karena skripsi ini di uraikan tentang praktek sertifikasi tanah wakaf di KUA Tembalang.

Pada skripsi saudara Nizar juga disebutkan bahwa praktek sertifikasi tanah wakaf di KUA Tembalang mendapat respon dari masyarakat kaitannya dengan penyuluhan yang dilakukan pihak KUA. Hal ini berbeda pada penelitian yang sekarang peneliti lakukan.

Letak perbedaan dapat dilihat bahwa skripsi saudara nizar hanya berkisar pada masalah inovasi-inovasi yang dibuat oleh KUA Tembalang untuk meningkatkan

---

<sup>21</sup> . Dr. H. Imam Suhadi . SH., *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT dan Bhakti Prima Yasa, 2002, hlm. 95-98.

<sup>22</sup> . Drs. H. Tulus, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, hlm. 51-112.

<sup>23</sup> Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer ( Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyin)*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2004 .

sertifikasi tanah wakaf, sedang pada penelitian yang peneliti lakukan adalah pada aspek kesadaran hukum masyarakatnya.

## **E. Metode Penelitian**

Masalah tentang sertifikasi tentunya sudah banyak yang menelitinya, namun penelitian tersebut kurang optimal. Sejauh penelusuran peneliti, belum menemukan penelitian yang membahas tentang kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf. Oleh karena itu, metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini berada pada masyarakat di wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang dengan mengfokuskan pada aspek kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf.

### **2. Sumber Data**

Adapun untuk memperoleh data penelitian yang objektif dan ilmiah, penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data Primer**

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>24</sup>

Sebagai data primer pada penelitian ini adalah Masyarakat yang berada di wilayah KUA Ngaliyan yang pernah melakukan sertifikasi tanah wakaf, atau masyarakat yang pernah melakukan perwakafan.

#### **b. Sumber Data Skunder**

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian.

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1998, hlm. 91.

Peneliti menggunakan data ini sebagai pendukung dari data primer yang peneliti dapat secara langsung dari masyarakat atau dari lembaga-lembaga pemerintahan. Data ini di dapat dari sumber-sumber yang relevan dengan bahasan yang peneliti kemukakan, yakni : Peraturan perundang-undangan, buku, artikel.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma naturalistik. Penelitian dengan konteks naturalistik dengan harapan makna yang di angkat dari penelitian tersebut memang dari konteksnya bukan dari konsep prapenelitian.<sup>25</sup> maka dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode :

#### a. Metode Observasi

Metode observasi yakni teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tidak langsung, dengan alat atau tidak terhadap gejala-gejala subyek yang di selidiki baik pada situasi sebenarnya atau situasi buatan.<sup>26</sup>

Menurut Guba, observasi itu interaktif, antar peneliti dengan yang di teliti, dan ada pengaruh yang timbal balik.<sup>27</sup>

Observasi atau pengamatan, peneliti gunakan untuk mencari gejala-gejala hukum tentang kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf yang muncul di masyarakat.

Dalam melakukan observasi, peneliti interaktif dengan masyarakat, karena mereka beraktifitas, maka secara bersama peneliti dan yang diobservasi membangun data penelitian.

#### b. Metode Sampel

---

<sup>25</sup> Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, edisi III, 1998.

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa S.H., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hlm 26.

<sup>27</sup> Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, *Ibid*, hlm 115.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.<sup>28</sup> Oleh karena populasi penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Ngaliyan yang memiliki sifat homogen serta terdapatnya perbedaan-perbedaan yang secara umum ada antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, maka peneliti hanya mengambil satu sampel kelurahan Podorejo dengan memilih 27 masyarakat untuk di jadikan responden.

#### c. Metode Kuesioner atau Angket

Koesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.<sup>29</sup>

Penggunaan metode ini, peneliti gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan, sikap hukum, dan pola perikelakuan hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf di wilayah KUA Ngaliyan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan disertai jawaban-jawaban pilihan yang berhubungan dengan sertifikasi tanah wakaf, kemudian diberikan kepada responden untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

#### d. Metode Wawancara/ Interview

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.<sup>30</sup>

Metode wawancara di gunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni masyarakat di wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang berdasar pada sampel yang dipilih, Penggunaan metode ini untuk mengetahui lebih jauh tentang pengetahuan,

---

<sup>28</sup> Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu Pendekatan)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm 131.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 151.

<sup>30</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986, hlm. 48



pemahaman, sikap dan pola perikelakuan hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf.

Karena berkaitan dengan program pemerintah, maka dalam memperoleh data ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pejabat KUA dalam hal ini PPAIW yang bertugas mencatat sertifikasi tanah wakaf.

#### e. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Metode Dokumentasi di gunakan untuk melengkapi data dari sumber aslinya yakni masyarakat di wilayah KUA Ngaliyan, dengan cara mengumpulkan dokumen sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ngaliyan dan data di KUA Ngaliyan kota Semarang.

#### 4. Teknik Analisa Data

Menurut Moleong, analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan uraian data.<sup>32</sup>

Teknik analisa yang digunakan merupakan analisa data kualitatif, dalam analisa ini menekankan pada pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perikelakuan masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf di wilayah KUA Ngaliyan.

Untuk klarifikasi, verifikasi dan eksplanasi mengenai data dan fenomena yang muncul dilapangan, dilakukan dengan mendiskripsikan sejumlah variabel-variabel dengan masalah yang diteliti, untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.

### F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, antara lain :

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *LokkCit*, hlm. 236

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990, hlm. 103.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang hukum dan Sertifikasi tanah wakaf. Bab ini berbicara mengenai sejarah hukum dan teori kesadaran hukum. Yang terakhir pada bab ini diterangkan tentang hukum wakaf dalam Islam yang meliputi, pengertian, syarat dan rukun wakaf, jenis-jenis wakaf, beberapa pendapat ulama, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah dan pendaftarannya serta sertifikasi tanah wakaf.

Bab ketiga tentang profil masyarakat Kecamatan Ngaliyan, meliputi letak geografis Kecamatan Ngaliyan, Sertifikasi tanah wakaf di KUA Ngaliyan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi, Kesadaran hukum masyarakat Ngaliyan dalam sertifikasi tanah wakaf yang meliputi, pemahaman hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum.

Bab keempat berisi analisa terhadap data yang tertera pada bab II dan bab III. Pembicaraan dalam bab ini berkisar mengenai sertifikasi Di KUA Ngaliyan, kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf di wilayah KUA Ngaliyan yang meliputi Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perikelakuan Masyarakat.

Bab kelima merupakan proses akhir dari semua bab, sehingga dapat di tarik kesimpulan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf. Bab ini berisi kesimpulan, rekomendasi, dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG HUKUM DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

#### A. Kerangka Teori Kesadaran Hukum

##### 1. Sejarah Pembentukan Hukum

Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah hukum adat. Untuk jangka waktu yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma social lainnya dan norma agama hindu memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian social.

Hukum islam masuk di Indonesia bersama-sama dengan masuknya Agama islam di Indonesia, meskipun ada perbedaan mengenai waktu masuknya, namun berdasarkan kesimpulan dari seminar tentang masuknya islam ke Indonesia pada 17-20 Maret tahun 1963 di Medan, di sebutkan bahwa islam masuk di Indonesia pada abad pertama hijriyah ( abad ketujuh/ kedelapan belas masehi ) dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa menurut sumber yang diketahui islam masuk pada abad pertama hijriyah melalui pesisir Sumatra sampai ke pulau jawa yang dibawa oleh para saudagar.<sup>1</sup>

Dalam hukum-hukum jawa yang diwakili oleh babad tanah jawi, babad mataram dan pepakem carbon pada abad keenam belas, Atho' Madzar yang mengutip Hooker menyatakan bahwa pengaruh hukum islam bersifat samar-samar karena hukum islam dianggap hanya sebagian dari hukum dan itupun sejauh adat pribumi telah menerimanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul ghofur, M.Ag., *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustak Pelajar (di terbitkan atas kerjasama dengan Walisongo Press), 2002, hlm 116-117.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 122-123.

Atas dasar itulah, para ahli hukum belanda menganggap, bahwa sebelum dan sesudah tahun 1300 di Indonesia berlaku hukum islam. Pandangan ini melahirkan sebuah teori yang di sebut *reception in complexu*. Teori ini dipelopori oleh para ahli hukum belanda seperti C.F. Winter, Solomon Keyzer dan mencapai puncak ketenarannya melalui L.W.C. Van den Berg. Politik hukum ini dapat dilihat pada politik hukum colonial pada waktu itu, yang memberlakukan hukum islam bagi penduduk pribumi yang beragama islam.<sup>3</sup>

Ajaran *reception in complexu* ternyata tidak bertahan lama, dengan dipelopori oleh Cornelis Van Vollenhoven mulai mengkritik ketentuan-ketentuan yang termuat dalam stadsblad 1855, sebelumnya ajaran *reception in complexu*. dikecam oleh Snouck Hurgronje, yang waktu itu menjabat sebagai Penasihat Pemerintah Belanda Urusan Islam dan bumiputra, kecamannya itu didasarkan atas penemuannya ( bahwa di Aceh selain hukum islam berlaku pula ketentuan-ketentuan lain).

Atas dasar penemuannya itu, sebagai pengganti ajaran *reception in complexu*, Snouck Hurgronje mengemukakan teorinya yang terkenal dengan teori *receptie*. Muatan pokok dari teori ini merupakan prinsip dari *divide et impera* yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum islam.<sup>4</sup>

Teori ini menghendaki bahwa hukum yang hidup dan berlaku dikalangan rakyat Indonesia ( pada waktu itu ; bumiputra ) adalah hukum adat, Hukum islam meresepsi terhadap hukum adat, hukum islam hanya mempunyai kekuatan berlaku jika hukum adat menghendakinya. Ajaran inilah yang kemudian digunakan dasar untuk menentang isi pasal-pasal yang termuat di dalam *regeerings reglemeent* (RR) tahun 1885 oleh van Vollenhoven beserta para pengikutnya.

---

<sup>3</sup> Dr. Otje Salman, SH., *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung : Penerbit Alumni, 1993, hlm 22

<sup>4</sup> Dr. Ahmad Rofiq, M.A., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2001, hlm 65.

Tampaknya, berlakunya ketentuan hukum tersebut tidak memuaskan mereka yang menghendaki di Indonesia tetap diberlakukannya hukum islam tanpa melalui hukum adat. Kelompok ahli hukum ini termasuk di dalamnya Hazairin menentang diterapkannya *teori receptie* dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Mereka menghendaki digunakannya teori *receptie a contrario* atau *teori receptie exit* yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum islam. Teori baru tersebut, merupakan kebalikan dari teori *receptie* Snouck Hurgronje.<sup>5</sup>

Sebagai sandaran teori baru ini adalah kenyataan bahwa di beberapa wilayah Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama islam dan kuat menjalankannya, terdapat kecenderungan bahwa mereka menghendaki diberlakukannya hukum islam pada perbuatan-perbuatan hukum tertentu, seperti dalam perkawinan, pewarisan, perwakafan, dan kekeluargaan lainnya.

Hazairin berpendapat bahwa berlakunya hukum islam secara formal di Indonesia hendaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk itu.<sup>6</sup>

Menurut Dr. Ojje Salman, SH, hubungan antara hukum adat dan hukum islam didasarkan atas ketiga teori yang telah dikemukakan diatas. Dari ketiga teori tersebut dapat dilihat bahwa setiap teori, beserta para pendukungnya, mempunyai kecenderungan untuk mengangkat salah satu system hukum, hukum adat atau islam pada kedudukannya yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut ia berpendapat bahwa hukum adat dan islam memiliki taraf yang sejajar dalam daya berlakunya di Indonesia. Ini berarti bahwa baik teori *reception in complexu*, teori *receptie* maupun teori *receptie a contrario* daya berlakunya hukum tidak disebabkan oleh meresepsinya system hukum tersebut

---

<sup>5</sup> Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 20-21.

<sup>6</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Islam*, Jakarta : Tinta Mas, 1974, hlm 101.

pada system hukum yang lainnya, tetapi hendaknya disebabkan olah adanya kesadaran hukum masyarakat yang nyata menghendaki bahwa hukum itulah yang berlaku.<sup>7</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penyelidikan hukum dapat dilakukan dengan cara mempelajari proses terbentuknya norma hukum dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, atau dengan cara mempelajari timbulnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai akibat adanya suatu norma hukum.

Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang sudah seharusnya, akan menjadi hukum kebiasaan. Di samping itu kebiasaan dapat menjadi hukum apabila kebiasaan tersebut dirasakan sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati. Perasaan tersebut dapat terjadi apabila kebiasaan tersebut dikukuhkan oleh pimpinan suatu masyarakat, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat tradisional. Sedangkan dalam masyarakat modern hal tersebut disebabkan oleh pendapat umum, yurisprudensi dan doktrin. Bagi mereka yang tergolong dalam aliran posistivisme hukum beranggapan bahwa hukum kebiasaan hanya berlaku sebagai hukum yang sungguh-sungguh apabila undang-undang memberi kepadanya kekuatan yang mengikat. Menurut teori tersebut hukum ada karena Negara menghendakinya. Dengan demikian, sekalipun diakui bahwa hukum terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, peranan Negara tampak dominan dalam pembentukan hukum.

Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tumbuh dan berkembang secara dinamis, sehingga perasaan hukum terhadap nilai-nilai yang ada sebelumnya pun akan bergerak secara dinamis pula yang merupakan sebuah pencerminan kesadaran hukum masyarakat.

Seperti telah di singgung di muka, bahwa politik hukum Indonesia mulai tampak jelas sejak ditetapkannya ketetapan MPR No.IV/1973. dari ketetapan MPR tersebut

---

<sup>7</sup> Dr. Otje Salman, *Opcit*, hlm 25.

ternyata bahwa pembangunan di bidang hukum harus diarahkan kepada penongkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional.

Hukum bukan saja merupakan gejala normative, melainkan juga merupakan gejala social dan empiris. Hal tersebut diketahui dari pengertian hukum yang di kemukakan oleh Mohktar Kusumaatmadja.

Hukum sebagai gejala normative dapat dilihat dari kata-kata “*asas-asas dan kaidah-kaidah*” pada pengertian hukum di atas, sementara hukum sebagai gejala social dapat dilihat dari kata-kata “*lembaga-lembaga dan proses-proses*”.<sup>8</sup>

Tentang factor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, bisa jadi dapat disebabkan oleh adanya ketakutan terhadap sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar hukum, atau karena kepentingan-kepentinganya terjamin oleh hukum, bahwa akan mematuhi hukum karena merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya.

Seseorang mematuhi hukum dapat disebabkan factor-factor diatas, hal ini berlainan dengan kesadaran hukum yang lebih berkaitan pada aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perikelakuan hukum seseorang atau warga masyarakat.

## 2. Pengertian Kesadaran Hukum

Istilah kesadaran secara etimologi berasal dari kata sadar yang berarti merasa, tahu, dan mengerti. Dalam istilah fiqh sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik buruk. Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum. Sadar juga berarti *al-idrak* ( berakal ), sadar atau kesadaran sangat erat kaitannya dengan akal, hanya orang yang berakallah yang mempunyai kesadaran.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dr. Otje Salman, *Look Cit*, hlm 29.

<sup>9</sup> Ensiklopedi Hukum Islam : Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid 5, hlm 1525.

Abdul Qodir Audah, ahli hukum pidana islam dari mesir, menjelaskan fase-fase kesadaran yang dilalui seseorang sejak ia dilahirkan sampai dewasa yakni ; *fase*, sebelum mempunyai kesadaran ( sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai usia 7 tahun ) *atau fase anak-anak, fase telah memiliki kesadaran yang masih lemah /Mumayiz* ( sejak seseorang berusia 7-15 tahun ), *fase yang telah mempunyai kesadaran yang sempurna* ( yang di mulai dari usia 15 tahun sampai seseorang meninggal ) *atau disebut fase dewasa.*<sup>10</sup>

### 3. Konsepsi Kesadaran Hukum

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang di bentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya.<sup>11</sup>

Penetapan konsep hukum merupakan tahap awal bagi proses pembentukan, penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat hukum. Pada tahap ini, suatu masyarakat hukum harus memilih dan menetapkan suatu desain pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum yang dipilihnya dengan mempertimbangkan kondisi social, budaya, psikologi dan seluruh aspek kemasyarakatan.

Untuk tradisi hukum, masyarakat harus memilih budaya hukum tertulis, tidak tertulis atau kombinasi keduanya dengan mempertimbangkan aspek positif dan negative dari masing-masing tradisi itu.

Secara keseluruhan, penetapan konsep hukum hakikatnya adalah penetapan, pemulihan, atau peningkatan eksistensi, kompetensi, dan fungsi dari masing-masing

---

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> Prof. Dr. Ili Rasjidi, S.H., S. Sos., LL.M, IB Wyasa putra, S.H., *Hukum Suatu Sitem*, bandung : Remaja Rosdakarya, 1993, hlm 111.



komponen system hukum sehingga formulasi konsep hukum itu merupakan desain fungsi dari setiap komponen system hukum dan desain proses dari suatu system hukum.

Dari konsep inilah merupakan awal dari adanya konsep kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep yang menjadi kesepakatan dalam masyarakat.

Faham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada warga-warga masyarakat merupakan suatu factor yang menentukan bagi sahnya hokum, pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Didalam kerangka proses tersebut timbul masalah. Oleh karena adanya ketidak sesuaian antara dasar sahnya hukum ( yaitu pengendalian social dari penguasa atau kesadaran masyarakat ) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya atau tidak ditaatinya hukum tertulis tersebut. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan didalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtbewusstsein* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya (G.E. Langemeijer 1970 ).<sup>12</sup>

Pendapat tersebut di atas mengarahkan persoalan pada masalah bagaimana para warga masyarakat untuk siapa hukum dibuat, merasakan dan menerima hukum tersebut. Masalah yang sama juga terungkap oleh ajaran-ajaran yang berpendapat pokok, bahwa sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok social. apa yang penting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan social yang ada di belakang peraturan-peraturan. (H.L.A. Hart 1961). Podgorecki, pembentukan hukum dan masyarakat, apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negative dari masyarakat. Semakin besar pertentangan-pertentangan antara peraturan dan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Sudah tentu pembentuk

---

<sup>12</sup> Dr. Soerjono Soekanto, SH. MA., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1982, hlm 143.

hukum dapat memperlakukannya dengan paksaan, dengan akibat meningkatnya biaya-biaya social ( A. Podgorecki 1973 ).<sup>13</sup>

Ada sesuatu kecenderungan yang sangat kuat, agar terjadi kesesuaian dan keserasian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi, sisi yang satu merupakan suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang kedua merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu.<sup>14</sup> Dengan kata lain konsepsi tentang kesadaran hukum menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya manusia dan pada “kami”nya.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum individu dan menjadi pangkal dari kesadaran hukum masyarakat. Sehingga kesadaran hukum dapat dikatakan bahwa perasaan dan keyakinan hukum inilah yang merupakan inti dari kesadaran hukum. Bila perasaan dan keyakinan dari individu-individu itu membentuk menjadi satu dalam masyarakat, maka kesadaran hukum tersebut merupakan kesadaran hukum pada masyarakat.<sup>15</sup>

Sehingga perlu adanya perbedaan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 146-147.

<sup>14</sup> John Z. Loudoe, S.H., *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hlm 163.

<sup>15</sup> Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1988, hlm 146-147.

perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah ( J.J. Von Schmid 1965:63).<sup>16</sup>

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada yakni tentang nilai-nilai hukum dan bukan penilaian hukum terhadap suatu kejadian-kejadian yang kongkrit dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.

Suatu konsep lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum adalah mengenai kebudayaan hukum ( legal culture ). Konsep ini secara relative baru dikembangkan, dan salah satu gunanya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya ( L.M. Friedman 1969 :29-44).<sup>17</sup>

Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat, oleh karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai factor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama dan didalam memenuhi kebutuhan utamanya para warga masyarakat mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang factor-faktor yang mendukung dan yang menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama tersebut.

Bila dianggap bahwa hukum merupakan konkretisasi dari system nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya keselarasan dan keseimbangan antara hukum dengan system-sitem nilai tersebut, dengan demikian konsekwensinya adalah bahwa perubahan pada system nilai-nilai harus di ikuti dengan perubahan hukum atau dilain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan pada system nilai-nilai tersebut.

---

<sup>16</sup> Dr. Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Op. Cit, hlm 152.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 153.

Dalam kaitannya dengan kesadaran hukum terdapat empat indicator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:<sup>18</sup>

a) Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang di atur oleh hukum. Sudah tentu hukum disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun sesuatu perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat juga kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undang-undangkan.

b) Pemahaman hukum

Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang, mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

c) Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan-pilihan warga terhadap hukum yang sesuai

---

<sup>18</sup> Dr. Otje Salman S.H., *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung : Penerbit Alumni, 1993, hlm 30

dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Kaitannya dengan sikap hukum Soerdjono Soekanto mengatakan, bahwa perlu adanya pembedaan sikap, sikap yang fundamental dan instrumental. Sikap fundamental merupakan sikap yang dilakukan secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya, sedang sikap instrumental merupakan sikap yang memperhitungkan keburukan dan kebaikan dari kaidah hukum.<sup>19</sup>

#### d) Pola perikelakuan hukum

Pola perikelakuan hukum merupakan setiap perikelakuan teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.<sup>20</sup> Pola ini merupakan yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai berapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perikelakuan hukum suatu masyarakat.

Apabila indicator-indikator di atas terpenuhi, maka derajat hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya, akibat tingginya kesadaran masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya.

Bila dipandang secara sempit, konsep kesadaran hukum seakan mensyaratkan terdapatnya peraturan-peraturan hukum terlebih dahulu sebelum kesadaran hukum timbul. Dalam sudut pandang yang lebih luas, konsep dapat diterapkan pada dua titik pusat. Bila titik pusat kesadaran hukum pada peraturan-peraturan hukum, melalui konsep ini dapat dilihat sampai sejauhmana efektifitas peraturan-peraturan hukum tersebut dalam masyarakat. Sementara titik pusat kesadaran hukum adalah fakta-fakta social,

---

<sup>19</sup> Dr. Soerjono Soekanto, *Look Cit*, hlm 244.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 247-248.

melalui konsep ini dapat dilihat proses pembentukan hukum dari fakta-fakta social tersebut.<sup>21</sup>

Selanjutnya, konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep hukum sertifikasi yang secara khusus menyangkut tanah wakaf.

Tentang konsep hukum islam, pada tulisan ini adalah hukum islam dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa hukum islam mengatur masalah hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Konsep hukum sertifikasi mengandung pengertian sebagai tindakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sesuatu yang dijadikan untuk itu, meskipun pada dasarnya konsep ini tidak dijelaskan secara jelas dalam perwakafan islam, karena memang tindakan mewakafkan dalam islam adalah semata-mata hanyalah untuk ibadah kepada Allah.

Di lihat dari hukum sertifikasi di atas tidak akan terlepas dari hukum islam yang mengatur masalah wakaf, karena pranata wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam. Sehingga bila berbicara tentang permasalahan perwakafan, tidak akan lepas dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena apabila mendalami tentang wakaf, akan dihadapkan pada pendapat yang beragam.<sup>22</sup> Maka dari itu akan penulis bahas sebagian pendapat dalam skripsi ini, dengan mengawali pada pengertian wakaf.

## **B. Hukum Wakaf Dalam Islam**

### **1. Pengertian Wakaf**

---

<sup>21</sup> Dr. Otje Salman, *Opcit*, hlm 44.

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Aditya Bakti, Cet. Ke-4, 1994, hlm. 15.

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan*.<sup>23</sup> di dalam kepustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*, keduanya merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, yang artinya menghentikan, bentuk jamaknya adalah *awqaf* dan *habasa* untuk *habs*, perkataan *habs* atau *ahbas* biasanya di pergunakan di Afrika Utara dikalangan pengikut mazhab Maliki.<sup>24</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia kata wakaf diartikan sebagai sesuatu benda yang diamalkan (tanah, bangunan dan sebagainya) untuk kemakmuran agama (Islam).<sup>25</sup>

Dalam hukum fiqh, istilah tersebut berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nazhir* (penjaga wakaf), atau kepada suatu badan hukum pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaat digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam.<sup>26</sup>

Dari berbagai pengertian wakaf menurut bahasa di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna menahan, mencegah atau melarang dan diam. Di katakan menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah.<sup>27</sup>

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.<sup>28</sup> Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke-4, 1994, hlm. 1578.

<sup>24</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm 80

<sup>25</sup> Pius A Partanto (eds), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 782.

<sup>26</sup> Harun Nasution, *Ersiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan: IAIN Syarif Hidayatullah, t.th., hlm. 981

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 14, Bandung: PT. Al Ma'arif Penerbit Percetakan Offset, 1987, hlm. 148.

<sup>28</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 2.

a. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Mengartikan wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk makhluk-Nya (seperti dikutip dari FyZee, 1966: 83).<sup>29</sup>

b. Maulana Muhammad

Wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.<sup>30</sup>

c. Jumhur Ulama

Wakaf adalah merupakan suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh, dengan putusnya hak penggunaan dari si wakif atau orang lain, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah.<sup>31</sup>

d. Muhammad Ibn Ismail as-Sau'any

Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.<sup>32</sup>

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

f. Dalam Ensiklopedi Islam

---

<sup>29</sup> H. Abdurrahman, S.H., M.H., *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung : P.T Citra Aditiya Bakti, 1994., hlm. 18

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 12.

<sup>31</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>32</sup> Said Agil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 127



*Waqf* adalah memberikan harta kekayaan dengan sukarela atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan pemerintah Islam untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum.<sup>33</sup>

Wakaf termasuk salah satu bentuk *filantropi* (kedermawanan), selain zakat, infaq dan sedekah yang senantiasa diharapkan pengamalannya, seperti terlihat dalam pesan-pesan ajaran Islam. Dengan demikian, berwakaf adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan agama.<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian wakaf di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf meliputi:

- a. Harta benda milik seseorang atau kelompok.
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
- c. Harta tersebut kepemilikannya oleh pemiliknya.
- d. Harta yang lepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan.
- e. Manfaat dari harta benda tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.

## 2. Dasar Hukum wakaf

### A. Dasar Hukum Wakaf Yang Bersumber Dari Nash

Di dalam al-Qur'an tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup wakaf.<sup>35</sup>

Dalil yang dipakai sebagai dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Ringkas), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1999, hlm. 432.

<sup>34</sup> DEPAG, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004, hlm. 2.

<sup>35</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 103

## 1. QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: 92)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali Imran: 92)

## 2. QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة: 267)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu". (QS. al-Baqarah: 267)

Jika menelaah berbagai firman Allah di atas, maka dapat dimengerti penyampaian perintah pelaksanaan adalah bersifat umum, berupa suatu perintah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan dimaksud adalah mengandung dan mencakup pengertian zakat, infak, shadaqah dan tidak ketinggalan pengertian wakaf. Wakaf dikatakan sebagai suatu kebaikan, karena wakaf merupakan penyerahan harta benda untuk kepentingan sosial yang tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri (*taqarruf*) kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan pahala dari pada-Nya.<sup>36</sup>

## B. Dasar Hukum Wakaf Yang bersumber dari Hadits

Ada beberapa hadits yang berbicara tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf. Hadits tersebut antara lain sebagai berikut:

## 1. Hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Umar

عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخير. فأتى النبي ص.م يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فمأتمرتي به؟ قال: إن شئت

<sup>36</sup> Taufik Hammami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT Tatanusa, 2003, hlm. 41-42.

حبست أصلها وتصدق بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها. ولا يتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu 'Umar ra. Berkata: "Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. guna meminta instruksi sehubungan dengan tanah tersebut". Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?" "Beliau bersabda: "Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri".

2. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: "Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya".

Jelas, maksud dari shadaqah jariyah adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus-menerus mengalir selama harta benda wakaf masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan shadaqah jariyah yang manfaat dan pengaruhnya kekal setelah pemberi sedekah meninggal dunia.<sup>37</sup> Itulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya wakaf dalam syari'at Islam. Bila dilihat dari beberapa dalil di atas, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah SWT melalui harta benda yang

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Fii Fiqh al-Aulawiyyaati Diraasah Jadiidah fii dhaw' al-Qur'an wa as-Sunnati*, Terj. Muhammad Nurhakim "Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 123.

dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain. Meski demikian, ayat al-Qur'an dan hadits di atas bisa menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Dimana sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan.

Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT, yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas seseorang.<sup>38</sup>

Dengan demikian, wakaf dapat penulis artikan sebagai suatu perbuatan memisahkan harta milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridlo Allah SWT semata dan setelah benda tersebut diwakafkan maka benda tersebut tidak ada di tangan wakif dan disyaratkan benda yang diwakafkan adalah benda yang jelas.

### 3. Rukun-rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab "*rukun*" yang berarti tiang, penopang atau sandaran.<sup>39</sup> Dengan kata lain, sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak akan ada hukum.<sup>40</sup> Atau dengan kata lain rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Dengan demikian, sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena keberadaan yang satu sangat menentukan

---

<sup>38</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, hlm. 7.

<sup>39</sup> Anton M. Moelyono, (*et.al*), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 757.

<sup>40</sup> Muhammad Rifa'i, *Ushul Fiqh*, Semarang: Wicaksana, 1991, hlm. 15.

keberadaan yang lainnya. Wakaf dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

➤ *Wakif* (واقف)

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (KHI Pasal 215 ayat (1)).<sup>41</sup> Adapun syarat-syarat wakaf yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Cakap berbuat *tabarru*. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan muslim<sup>42</sup>
2. Sehat akalnya dan dalam keadaan sadar
3. Kehendak sendiri tidak sah bila dipaksa
4. Telah mencapai umur dan cakap
5. Pemilik sah dari barang (benda) wakaf

➤ *Mauquf* atau harta yang di wakafkan

*Mauquf* adalah benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan dan tidak hanya dapat sekali pakai serta bernilai menurut ajaran Islam.<sup>43</sup>

Adapun syarat-syarat *maukuf* adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- c. Hak milik wakif jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda wakaf merupakan benda yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa
- d. Benda wakaf itu tidak dapat dimiliki dan dilimpahkan kepemilikannya

---

95. <sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 215 ayat (1), hlm.

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Alqoisindo, 1997, hlm. 341.

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 95.

- e. Benda wakaf dapat dialihkan jika hanya jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.

➤ *Mauquf 'Alaih atau Tujuan Wakaf*

Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah diwakafkan hartanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah dan lain-lain, atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridlo Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Tujuan wakaf merupakan wewenang wakif. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*wakaf ahli*), atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*wakaf khairi*).<sup>44</sup>

Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung dan memungkinkan peruntukkan untuk tujuan maksiat.

➤ *Sighat Atau Ikrar Peryataan Wakaf*

Para fuqoha sepakat bahwa orang yang yang berwakaf harus membuat pernyataan yang di sebut dengan shighat. *Sighat* adalah pernyataan wakif sebagai penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan.<sup>45</sup> Para fuqoha membedakan shighat kepada lafaz yang nyata ( *al-sarih*) dan lafaz yang yang tidak jelas ( *kinayah* ) sepakat bahwa orang yang yang berwakaf harus membuat pernyataan yang di sebut dengan shighat.

---

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normative ke Pemahaman Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 323.

<sup>45</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 20.

Para fuqoha telah menetapkan bahwa shighat wakaf juga harus memnuhi sayarat sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Shighat wakaf itu harus mengandung pernyataan yang berarti kekal (*al-Ta'bid*).
- b. Shighat wakaf itu harus mengandung arti tegas dan tunai, tidak boleh ditangguhkan untuk masa yang akan datang.
- c. Shighat wakaf harus mengandung kepastian artinya tidak boleh diikuti syarat kebebasan memilih.
- d. Shighat wakaf itu harus tidak diikat dengan syarat yang batil.
- e. Shighat wakaf harus mengandung penjelasan tempat atau tujuan wakaf artinya seseorang yang berwakaf harus menjelaskan ke mana dan untuk apa atau untuk apa wakaf itu diberikan.

Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu di pandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan *ijab*, perwakafan telah terjadi.<sup>47</sup>

#### ➤ *Nazhir* Wakaf atau Pengelola Wakaf

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *Tabarru'*. Namun sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nazhir* sangat diperlukan.<sup>48</sup>

Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. *Nazhir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya,

---

<sup>46</sup> H. Abdurrahman, SH, MH., *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita(edisi revisi)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm 52-53.

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Drs. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000, hlm 498.

memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>49</sup>

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazhir* asalkan dia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, kalau *nazhir* itu adalah perseorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya yaitu: beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan wakaf.<sup>50</sup>

#### 4. Syarat-syarat Wakaf

Menurut hukum, untuk sahnya amalan wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

##### a. Wakaf harus secara tunai

Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.<sup>51</sup>

##### b. Tujuan wakaf harus jelas

Oleh karena itu bila seseorang mewakafkan hartanya tanpa menyebutkan tujuannya sama sekali, maka di pandang tidak sah. Meskipun demikian, jika wakif mengesahkan wakafnya itu kepada suatu badan hukum, maka ia di pandang sah. Sebab penggunaan harta wakaf menjadi tanggung jawab badan hukum.<sup>52</sup>

##### c. Wakaf yang sah harus dilaksanakan

Wakaf yang sah itu wajib dilaksanakan, dengan syarat tidak boleh ada khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab

---

<sup>49</sup> Said Agil Husin Al-Munawir, *Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>50</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>52</sup> *Ibid*.



pernyataan wakaf berlangsung seketika dan untuk selamanya.<sup>53</sup> Dalam hubungannya dengan syarat-syarat wakaf di atas, apabila wakif mengajukan syarat mengenai harta wakaf, maka syarat itu harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## 5. Jenis-jenis Wakaf

Untuk jenis-jenis wakaf harta wakaf bisa ditinjau dari dua segi yaitu ditinjau dari tujuan wakaf dan ditinjau dari harta wakaf. Bila ditinjau dari tujuan wakaf, wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan.<sup>54</sup>

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.<sup>55</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.

### b. Wakaf Khoiri

---

<sup>53</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm. 87.

<sup>54</sup> DEPAG, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 14.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Wakaf khoiri adalah wakaf yang ditujukan untuk kebaikan tetapi bukan untuk keluarga.<sup>56</sup> Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum).<sup>57</sup> Seperti wakaf yang disertakan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan pembangunannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan jenis inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (manfaat) harta jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau di lihat dari kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.<sup>58</sup>

Selanjutnya bila ditinjau dari harta wakaf, maka terbagi menjadi:

1. Harta atau benda tak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan.

Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al Najjar yang

---

<sup>56</sup> Bahrin Abu Bakar, L C., *Op. Cit.*, hlm. 733.

<sup>57</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op. Cit.*, hlm. 17.

<sup>58</sup> *Ibid.*

mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.

2. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya.

Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariyahnya terbatas hingga benda-benda itu tidak dapat dipertahankan keberadaannya. Maka selesailah wakaf tersebut, kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.<sup>59</sup>

## 6. Hikmah Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah, yaitu nilainya lebih dominan pada ibadah sosial. Ini berarti juga merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis ibadah serupa, seperti amal shalih, shadaqah, infaq dan lainnya.

Segala sesuatu yang diperintahkan Allah tentu ada hikmah-hikmah yang berguna bagi kehidupan manusia demikian halnya wakaf.

Hikmah Wakaf antara lain :

- a. Untuk menghimpun dana bagi pengembangan dan kelangsungan agama Islam di suatu daerah.
- b. Memberi kesempatan kepada umat Islam untuk beramal jariyah, yang relatif lama dimanfaatkan oleh umat manusia.
- c. Mendapatkan pahala yang terus menerus selama harta wakaf itu masih berkesinambungan dalam kebajikan.

Orang mewakafkan hartanya akan mendapatkan nama harum dikalangan orang yang menerima wakaf atau dikalangan orang lain yang mengetahuinya.

---

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 505.

### C. Perwakafan Menurut Hukum Adat

Sekalipun pada hakikatnya lembaga wakaf ini adalah bersal dari Hukum Islam, akan tetapi pada kenyataannya seakan-akan sudah merupakan kesepakatan di kalangan para ahli hukum kita untuk memandang masalah wakaf ini sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini adalah dikarenakan sudah meresepsinya penerimaan lembaga wakaf ini di dalam masyarakat Indonesia dan di anggap sebagai suatu lembaga Hukum yang timbul sebagai hukum adat/kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka .<sup>60</sup>

Menurut Ter Haar wakaf ini adalah merupakan suatu Lembaga Hukum Islam yang diterima di banyak daerah di Nusantara ini yang di sebut dalam istilah Belanda *Vrome Stichting*.<sup>61</sup> Menurutny sekalipun masalah tentang wakaf didasarkan pada ketentuan dan ajaran Agama Islam akan tetapi lembaga wakaf ini sudah di kenal di Indonesia sebelum kedatangan Agama Islam. Pada tahun 1922 ada beberapa jenis wakaf yang tidak tunduk pada aturan-aturan Islam, yaitu ; pada suku Badui di Cibeo (Banten selatan) dikenal dengan “Huma Serang”, huma adalah lading-ladang ini di kerjakan setiap tahun secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama.

Konsep wakaf yang dikemukakan oleh Ter Haar merupakan sebagai perbuatan hukum yang bersifat rangkap, maksudnya rangkap ialah bahwa perbuatan itu disatu pihak perbuatan mengenai tanah atau benda yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus, tetapi dilain pihak perbuatan tadi menimbulkan suatu badan dalam hukum adat.<sup>62</sup>

Menurut hukum adat pembuat wakaf harus mempunyai hak dan kuasa penuh atas barang yang di wakafkan, barangnya harus di tunjuk dengan jelas dan tidak boleh di

---

<sup>60</sup> H Abdurrahman, S.HMH, *Opcit*, hlm 91

<sup>61</sup> Mr. B Ter Haar Bzn ( terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto), *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramita, 1976, hlm 161.

<sup>62</sup> *Ibid*

pakai kea rah hal yang terlarang menurut hukum islam, tujuannya yang jelas itu harus dilukiskan dengan kata-kata yang terang, orang yang menerima wakaf harus di tunjuk seterang-terangnya.

Menurutnya, andaikata wakaf itu semata-mata hanya bersangkutan dengan hukum tak tertulisnya orang-orang pribumi saja, maka akan cukuplah dengan tokoh hukum (rechtsfigur) demikian yakni pada suatu benda yang tidak ada penemunya dan tujuannya ditentukan dengan lengkap dan tujuan itu dapat dicapai sepenuhnya bila perlu dengan memaksa supaya aturan yang di tentukan oleh pembuat wakaf itu dijalankan.<sup>63</sup>

#### **D. Peraturan Tentang Perwakafan Tanah dan Tanah Wakaf Di Indonesia**

Peraturan mengenai persoalan perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang apa yang dinamakan dengan hukum agraria ( Agraria Law) yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta hubungan antara orang dengan orang yang berkenaan dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.<sup>64</sup>

Hukum agraria yang berlaku di Negara kita berpokok pangkal pada undang-Undang no. 5 tahun 1960, yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. tentang ketentuan pokok Agraria yang lebih di kenal dengan singkat U.U.PA.

Semenjak dahulu persoalan tentang wakaf ini di atur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari sumber hukum islam. Disamping itu telah pula dikeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf antara lain : Peraturan dimaksud pada zaman kemerdekaan masih tetap di berlakukan

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 162.

<sup>64</sup> H. Abdurrahman, S.H., *Masalah perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan tanah wakaf Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1994, hlm 67.

terus karena masih belum diadakan suatu peraturan tentang perwakafan yang baru. Di zaman kemerdekaan telah pula dikeluarkan beberapa ketentuan dan petunjuk dari Departemen Agama tanggal 22 Desember 1953 tentang berbagai petunjuk mengenai wakaf.<sup>65</sup>

Peraturan tentang persoalan wakaf yang berasal dari zaman colonial tersebut pada zaman kemerdekaan dirasakan kurang memadai dan sudah banyak ketinggalan. Oleh karena itu dan dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Negara kita, persoalan tentang perwakafan tanah ini di berikan perhatian khusus sebagaimana terlihat dengan adanya bab XI dari U.U.P.A. Undang-undang No.5/1960 tentang hak tanah untuk keperluan suci dan social.

Untuk masa sekarang mengenai peraturan disebutkan dalam dua Undang-undang, yaitu ; undang-undang No. 5/1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok agraria ( UUPA) pasal 49 di atur tentang Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan social, pada ayat 3 dari pasal tersebut menyatakan perwakafan tanah milik dilindungi dan di atur dengan peraturan-pemerintah, Serta undang-undang No.7 / 1989 tentang peradilan Agama, dalam dalam pasal ini juga di sebutkan bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan serta wakaf dan sodaqoh.<sup>66</sup>

Dari ketentuan pasal 49 ayat 3 tersebut diatas maka dalam rangka melindungi berlangsungnya perwakafan tanah ini pemerintah akan memberikan pengaturan melalui suatu peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah milik yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1977 yakni peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 yang dimuat dalam

---

<sup>65</sup> Ibid hlm 70.

<sup>66</sup> Soedharyo Soimin, S.H., *Status Hak Dan Pembebasan Tanah (edisi kedua)*, Jakarta : Sinara Grafika, 2004, hlm 64-65.

Lembaran Negara 1977 No.38 tentang perwakafan tanah Milik, yang menjadi latar belakang dikeluarkannya peraturan pemerintah.

Peraturan yang berkenaan dengan masalah wakaf pada saat sekarang, dihadapkan pada sejumlah di berbagai instansi yang menangani atau ada hubungannya dengan masalah tersebut. Yakni tiga kelompok peraturan yang berkenaan ada hubungannya dengan wakaf, yaitu : <sup>67</sup>

- 1) Ketentuan mengenai wakaf pada umumnya ( semua bentuk wakaf ) hal ini di atur dalam buku III Kompilasi Hukum Islam ( pasal 215-228 ) Kompilasi Hukum Islam ini merupakan “pedoman “ untuk bidang Hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan Agama, KHI di berlakukan atas dasar :
  - a. Instruksi Presiden tanggal 10 Juni 1991 No.1 Tahun 1991. instruksi ini di tujukan kepada Menteri Agama agar menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas tiga buku, buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Wakaf.
  - b. Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 No 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi presiden No.1 Tahun 1991.
  - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/Hk.003/A2/91 tentang penyebarluasan instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
- 2) Peraturan-peraturan Khusus mengenai Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No.5 tahun 1960 .
  - a. PP RI Nomor 28 Tahun 1977 yang dipandang sebagai ketentuan induk yang mengatur masalah perwakafan tanah milik.

---

<sup>67</sup> H. Abdurrahman, *Opcit*, hlm 75.

- b. Peraturan Menteri Agama Tanggal 10 Januari 1978 Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaanya tentang perwakafan tanah milik.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Nopember 1977 Nomor 6 tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah secara khusus pada pendaftaran tanah milik dan biaya yang diperlukan.
- d. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 januari 1978 nomor 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah yang ditujukan kepada Kantor wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia.
- e. Peraturan Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam tanggal 19 April 1978 tentang formulir dan pedoman pelaksanaan PP tentang Perwakafan tanah milik, termasuk didalamnya mengatur tentang tata cara perwakafan tanah milik.
- f. Keputusan Menteri Agama tanggal 9 bAgustus 1978 Nomor 73 tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi diseluruh Indonesia untuk mengangkat dan memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- g. Intruksi Menteri Agama No 3 tahun 1979 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan Menteri Agama No 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian wewenang KAKANWIL Depag Propinsi untuk mengangkat dan memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam dan urusan Hajitanggal 25 Juni 1980 tentang pemakaian Bea Materai
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 27 tahun 1980 tentang ketentuan Materai.



- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam dan urusan haji tanggal 16 April 1981 tentang petunjuk pemberian Nomor formulir perwakafan tanah Milik.
  - k. Instruksi Menteri Agama RI tanggal 12 Desember 1989 Nomor 15 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan tanah wakaf.
  - l. Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 November 1990 Nomor 4 dan 24 tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf.
  - m. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan tanggal 27 Agustus 1991 Nomor 630.I-278 tentang pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf.
- 3) Peraturan-peraturan lain yang secara tidak khusus mengatur tentang masalah wakaf tetapi terkait dengan perwakafan
- a. PP No.9 tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
  - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juni 1989 No.26 tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan pemerintah No.7 tahun 1987.
  - c. Instruksi Menteri agama tanggal 12 Desember Tahun 1989 No.16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat Infaq dan Sadaqoh.

Dalam perkembangannya peraturan tentang perwakafan tanah telah di atur dalam UU Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaannya.

#### **E. Perwakafan dan Pendaftaran Tanah**

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia ( pasal 19 ayat 1 UUPA) yang kemudian di tindak lanjuti dengan keluarnya peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang memuat pengaturan secara teknik

penyelenggaraan pendaftaran tanah.<sup>68</sup> kemudian disempurnakan pada peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Sebagaimana penjelasan tentang peraturan-peraturan khusus perwakafan tanah pada pasal 49 UUPA diatas, yang kemudian diatur dalam Undang-undang RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksana yang mengatur tentang wakaf pada pasal 1, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>69</sup>

Sebagaimana PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pasal 3 (a) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, (b) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, (c) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Termasuk didalam pendaftaran tanah adalah tanah wakaf yang dijelaskan pada pasal 9 ( c) PP Nomor 24 tahun 1997, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yakni pada pasal 11 ayat 1(c) penerbitan sertifikat dan untuk kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi peralihan dan pembebanan hak ( pasal 11 ayat 2 ( a )), serta pada pasal 23 kaitannya dengan tanah wakaf dibuktikan dengan Ikrar Wakaf. Kemudian hal pembuktian terhadap tanah

---

<sup>68</sup> Bachtiar Effendi, S.H, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung : Alumni, 1993, hlm 52.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wakaf, 2005.

terdapat pada pasal 24 ayat 1 bahwa keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat buktimengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.<sup>70</sup>

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembuktian hak. Termasuk diantaranya adalah tanah wakaf dengan Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf baik yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakannya peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977.

---

<sup>70</sup> H. Ali Chomzah, S.H., *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2004, hlm 114-115.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

*Ajudikasi* adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

*Pendaftaran tanah untuk pertama kali* adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah atau peraturan pemerintah ini.

*Pendaftaran Tanah Secara Sporadis* adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau masal.

*Pendaftaran Tanah Secara Sistematis* adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara sistematis yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan.

*Pemeliharaan dan Pendaftaran tanah* adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

*Data yuridis* adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya.

## F. Sertifikasi Tanah Wakaf

Dari pengertian dasar sertifikasi, yang dimaksud dengan sertifikat adalah salinan surat ukur dan buku tanah yang di jahit menjadi satu serta diberikan sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri.<sup>71</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) yang tercatat dari orang yang berwenang yang dapat digunakan dengan bukti suatu kejadian.<sup>72</sup>

Sementara sertifikat tanah bisa berarti bahwa hal tersebut terkait dengan surat bukti pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.<sup>73</sup> Dari sumber lain, penerbitan sertifikat dimaksudkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang didaftar dalam buku tanah.<sup>74</sup>

Pengertian di atas ditegaskan lagi dalam peraturan-peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 khususnya pasal 1 ayat 2. bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana di maksud, dalam pasal 19 ayat 2, huruf C UUPA, untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik oleh satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah.<sup>75</sup>

Dalam undang-undang UUPA juga di sebutkan adanya perbedaan sertifikat yakni sertifikat dan sertifikat sementara, sertifikat sementara merupakan sertifikat tanah yang belum memiliki surat ukur.<sup>76</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm 49.

<sup>72</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 928.

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1997, hlm. 451.

<sup>75</sup> H. Ali Chomzah, S.H., *Hukum Agraria (pertanahan Indonesia)*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2004, hlm 58.

<sup>76</sup> Bachtiar Effendie, S.H., *OpCit*, hlm 49.

Sehingga pengertian sertifikasi bisa berarti proses tindakan hukum yang dilakukan seseorang terhadap tanah yang bersangkutan. Apabila dikaitkan dengan wakaf adalah suatu tindakan hukum yang diambil seseorang terhadap tanah wakaf guna melindungi keberadaannya dari kepemilikan hak secara personal maupun kelompok.

Sebagai usaha pemerintah untuk mengamankan dan menertibkan perwakafan tanah milik, tercantum dalam Undang-Undang No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan UU No 41 tahun 2004.

Mengenai tata cara sertifikasi adalah sebagaimana tercantum dalam juklak pensertifikasian tanah wakaf yang terjadi sejak berlakunya PP. Nomor 28 tahun 1977, sebagai berikut :<sup>77</sup>

1. Tanah yang sudah ada sertifikatnya
  - a. Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf
    - i. Sertifikat tanah
    - ii. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
    - iii. Surat keterangan pendaftaran tanah dari (SKPT) dari kantor pertanahan .
  - b. Proses pembuatan akta ikrar wakaf
    - i. Calon wakif harus datang dihadapan Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa Persyaratan pada poin (a).
    - ii. PPAIW melakukan meneliti atas kehendak calon wakif atas tanah yang di wakafkan, meneliti para Nadzir dengan menggunakan formulir W.5 (bagi Nadzir perorangan) atau W.5a ( bagi Nadzir badan hukum).

---

<sup>77</sup> Juklak Pensertifikasian Tanah Wakaf, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI, 1999.

- iii. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan PPAIW dan para saksi, kemudian di tuangkan dalam bentuk tertulis menurut bentuk formulir W.1.
  - iv. Calon wakif yang tidak dapat datang dihadapan persetujuan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan di bacakan kepada Nadzir dihadapan PPAIW dan saksi.
  - v. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 3 menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 menurut bentuk W.2.a. ( lembar pertama disimpan, lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, lembar ketiga dikirimkan kepada pengadilan agama setempat, salinan lembar pertama diserahkan kepada Wakif, salinan lembar kedua diserahkan kepada Nadzir, salinan lembar ketiga dikirim kepada kandepag, salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa setempat.
- c. Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf
- i. PPAIW atas nama Nadzir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan ; sertifikat tanah yang bersangkutan, Akta Ikrar Wakaf, surat pengesahan dari KUA Kecamatan mengenai Nadzir yang bersangkutan.
  - ii. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat ;
    - ✓ Mencamtumkan kata-kata “WAKAF” dengan huruf besar dibelakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada Buku Tanah dan Sertifikatnya.
    - ✓ Mencantumkan kata-kata :

“Diwakafkan untuk.....

berdasarkan akta Ikrar Wakaf PPAIW

Kecamatan.....tanggal,.....No.....pada halaman 3

(tiga) kolom sebab Perubahan Dalam Buku Tanah dan Sertifikatnya.

- ✓ Mencantumkan kata Nadzir, nama Nadzir disertai kedudukannya pada Buku Tanah dan sertifikatnya.

## 2. Tanah yang belum ada sertifikatnya

### a) Persyaratan pembuatan akta ikrara wakaf

- i. Surat-surat kepemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, girik dan lain-lain)
- ii. Surat Kepala Desa yang diketahui oleh Camat yang membenarkan surat-surat tanah tersebut dan tidak dalam sengketa
- iii. Surat-surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/Kotamadya setempat yang menyatakan sertifikata ( pasal 25 ayat 4 PP.no. 10/1961).

### b) Proses Pembuatan Akta Ikra Wakaf

Sama halnya dengan angka huruf b, untuk tanah yang sudah bersertifikat dengan keterangan seperti dimaksud dalam angka 2 huruf a.

### c) Pendaftaran Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

- i. PPAIW atas nama Nadzir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan mnyerahkan ; surat kepemilikan tanah ( termasuk surat pemindahan hak, girik, dall), Akta Ikrar Wakaf, dan surat pengesahan Nadzir.
- ii. Apabila memenuhi persyaratan untuk di konversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama Wakif (PMPA.2/1962 jo SK. 26/DDA/1970).

- iii. Apabila persyaratan untuk di konversi tidak dipenuhi dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama Wakif.
- iv. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dibalik nama atas nama Nadzir
- v. Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak penerbitan sertifikasinya setelah diperoleh SK. Pengakuan hak atas nama wakif, selanjutnya dilaksanakan pencatatan seperti halnya yang disebut angka 1 huruf c (ii).

### 3. Tanah yang belum ada haknya

Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf ( tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat dan pemerintah desa setempat mengakui sebagai tanah wakaf, sedangkan status tanahnya bukan milik adat (Negara)).

- a) Wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti penggarapan/ penguasaan.
  - i. Surat keterangan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat disamping menjelaskan tentang per-.
  - ii. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menerangkan status tanah Negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah Negara itu belum pernah terdaftar.
  - iii. Calon wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, selanjutnya untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf ( seperti halnya angka 1 huruf b)
  - iv. PPAIW mengajukan permohonan atas nama Nadzir kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi mealui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, dengan mnyerahkan surat-surat bukti



penguasaan/penggarapan atas nama Wakif serta surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka romawi (i) sampai dengan angka romawi(iii) tersebut di atas dan surat pengesahan Nadzir.

- v. Kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat memproses dan meneruskan permohonan tersebut ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
  - vi. Setelah diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah, atas nama Nadzir, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.
- b) Wakif atau ahli warisnya tidak ada, tidak mempunyai surat bukti penguasaaan/penggarapan.
- i. Surat keterangan Kepala Desa yang diketahui Camat disamping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan/penggarapan oleh calon Wakif.
  - ii. Proses selanjutnya sebagaimana tersebut dalam huruf a angka romawi (ii) sampai denga angka romawi (vi) di atas.
- c) Wakif atau ahli warisnya tidak ada
- i. Surat keterangan tentang tanah (kalau ada)
  - ii. Surat Kepala Desa diketahui Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa.
  - iii. Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut.
  - iv. Nadzir atau Kepala Desa mendaftarkannya kepada KUA Kecamatan setempat.
  - v. Kepala KUA meneliti dan mengesahkan Nadzir.

- vi. Membuat Akta Pengganti AIW
- vii. PPAIW atas nama Nadzir mengajukan permohonan Hak Atas Tanah/
- viii. Selanjutnya pemrosesan permohonan hak, SK Pemberian hak Atas Tanah dan penerbitan sertifikat atas nama Nadzir.

Dengan di keluarkannya UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaannya, telah memberikan posisi tersendiri, termasuk didalamnya di atur mengenai tata cara sertifikasi tanah wakaf.

Tata cara yang di maksud adalah untuk menyempurnakan tata cara sebelumnya yang di buat berdasar pada Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977, adapun tata cara yang berdasar pada UU No 41 tahun 2004 terdapat dalam pasal 17 sampai pasal 21, serta dalam peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 terdapat pada pasal 28 sampai pasal 39.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004.

## BAB III

## KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF

## A. Profil Masyarakat Kecamatan Ngaliyan

## 1. Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan

Secara geografis Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah 4.140 Ha yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, hutan, tanah keperluan fasilitas umum dan lain-lain.

Kecamatan Ngaliyan merupakan bagian dari 16 kecamatan yang berada di wilayah kota semarang, kecamatan ngaliyan sendiri terdiri dari 10 kelurahan yaitu kelurahan Gondoryo. Kelurahan Podorejo, Kelurahan Beringin, Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Bambangkerp, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Wonosari, dan Kelurahan Wates. Kecamatan Ngaliyan terletak di bagian barat kota semarang drngan batas-batas wilayah Yaitu :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tugu
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semarang Barat
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mijen
- d) Dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Jumlah penduduk sampai saat ini 103.862 jiwa yang sebagian besar atau 90 % beragama Islam. Jumlah penduduk laki-laki 46.467 jiwa dan perempuan 46,510 jiwa. Dilihat dari jumlah pemeluk agama, penduduk yang beragama Islam berjumlah 92.977 jiwa, Agama Kristen Protestan 4.198 jiwa, Agama Kristen Katolik 5.012 jiwa, Agama Hindu 472 jiwa, Agama Buddha 721 jiwa dan Lain-lain 88 jiwa.

Sarana peribadatan di Kecamatan Ngaliyan bisa dilihat dari 254 jumlah tempat ibadah yang ada yakni Masjid 73 buah, Langgar 131 buah, Musholla 25 buah, Gereja 5 buah, tidak ada Vihara, tidak ada Kuil.

## 2. Gambaran KUA Ngaliyan

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja jajaran Departemen agama yang merupakan jajaran terdepan serta ujung tombak yang berkedudukan di Kecamatan Ngaliyan. Dalam melaksanakan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan unsur pelayanan yang meliputi; pelayanan nikah, rujuk, talak, pembinaan keagamaan, kemasjidan, perwakafan, Badan Amil Zakat(BAZ), BP4, Ibadah, Sosial dan tugas-tugas sektoral maupun lintas sektoral.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan berdiri di atas tanah seluas 550 M2 dengan luas bangunan 90 m2, yang terletak di Jl. Prof. Hamka N0. 234 Ngaliyan.

### A. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Ngaliyan

Secara garis besar, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagliyan berpedoman pada KMA RI Nomor 45 Tahun 1981 Dan Kepres RI Nomor 45 Tahun 2002, yakni membantu dan melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah dalam bidang Agama.

Disamping Tugas secara umum di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan departemen agama Kota/Kabupaten maupun antar unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dengan instansi terkait di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan dalam bidang perkawinan.
2. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam bidang keagamaan

3. Melakukan bimbingan dalam bidang kemasjidan, zakat, perwakafan, dan ibadah sosial lainnya.
4. Melaksanakan pencatatan NTCR sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (KAM. No 18/75 yang disempurnakan pasal 730).
5. Menghimpun dan melakukakn dokumentasi serta menyajikan data statistic.

#### B. Pegawai KUA Kecamatan Ngaliyan

No	Nama Pegawai	Gol	Jabatan	Alamat
1.	Muadhim, SAg. NIP. 150234068	III/c	Kepala KUA	Bringin Rt.01/ 1 Ngaliyan
2.	Darodjat, S.Ag. NIP. 150294439	III/b	Penghulu	Kebonharjo Rt 03/V Tanjungmas Smg
3.	Dra. Siti Fatimah NIP. 150254705	III/d	Staf	Jl. Purwoyoso V/B No.23 RT 04/XII Ngaliyan
4.	Ida Farikhah, SH. NIP. 150242031	III/c	Staf	Griya Lestari A/4 No.35 RT 03/VIII Gondoryo Ngaliyan
5.	Bambang Prayitno NIP. 150238550	III/a	Bendahara	Perum Tugu Asri D.3 RT.06/1 Tambakaji Ngaliyan.
6.	Kusmanto NIP. 150231101	II/c	Staf	Segaran RT.03/4 Tambakaji Ngaliyan Semarang.

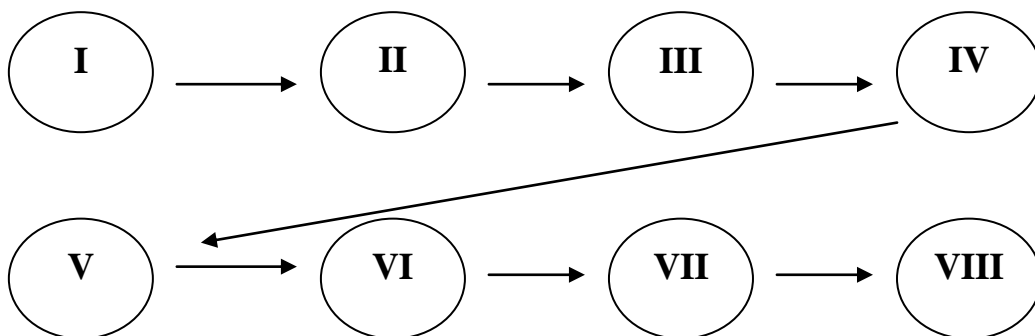
#### B. Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Ngaliyan

Dalam buku laporan pertanggungjawaban KUA Kecamatan Ngaliyan Tahun 2007 disebutkan bahwa sertifikasi wakaf merupakan salah satu upaya peningkatan Pemberian Bimbingan dan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Urusan Agama Islam selain zakat, infaq, sodaqoh dan kegiatan lainnya.

Tahapan biasa diterapkan oleh KUA dalam proses sertifikasi Tanah Wakaf adalah sebagai berikut:

- Menginventarisir Tanah Wakaf yang sudah memiliki sertifikat dan yang masih HM Pribadi untuk diwakafkan baik seluruhnya maupun diwakafkan sebagian.
- Mengumpulkan dan memberikan penyuluhan kepada ta'mir langgar/masjid/musholla yang tanahnya belum hak milik wakaf.
- Mengadakan koordinasi dengan pimpinan BPN maupun petugas yang menangani pensertifikatan tanah wakaf untuk memperlancar tebitnya sertifikat tanah wakaf.
- Menyelenggarakan pertemuan pengurus masjid, langgar, musholla, Lembaga Pendidikan Islam dengan Muspika untuk mensosialisasikan program tanah wakaf.

Secara skematik, proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Ngaliyan Kota Semarang masih berdasar pada proses yang di berikan oleh Departemen Agama RI sesuai dengan PP. No. 28 Tahun 1977, sebagai berikut :



Gambar I menunjukkan bahwa keluarga sedang mengadakan rapat untuk memutuskan mewakafkan tanah. II. Kepala keluarga (selaku Wakif), saksi dan Nadzir pergi ke KUA menghadap kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). III. PPAIW memeriksa persyaratan Wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nadzir. IV. Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW, untuk selanjutnya PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya. V. Wakif, Nadzir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W2.a). VI. PPAIW atas nama nadzir menuju ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah Wakaf dengan pengantar formulir W-7. VII. Kantor pertanahan

No	Kelurahan	Masjid		Musholla/ Langgar		Madrasah/ Sekolahan		Kuburan/ Makam		Pondok/ Pesantren		Panti Asuhan		Tanah Produktif		Jumlah	
		lk	lm2	lk	lm2	lk	Lm2	Lk	lm2	Lk	lm2	lk	Lm2	lk	lm2	lk	lm2
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10	
1	Gondorvo	4	635	1	75											5	710

2	Podorejo	3	3175	14	2340	3	3371			1	252				21	9138
3	Bringin	4	1020	11	1048			1	3269	3	879				19	6216
4	Purwoyoso	21	9373	16	2274	2	1315	1	2367						40	15329
5	Kalipancur	2	902	4	766										6	1668
6	Bambankerep	1	451	3	299										4	750
7	Ngaliyan	5	1901	10	1564	3	971								18	4436
8	Tambakaji	14	6535	18	3214	4	1402								36	11151
9	Wonosari	2	1495	11	1510	5	4168								18	7173
10	Wates			3	465	3	2109								6	2574
	Jumlah	56	25487	91	13555	20	13336	2	5636	4	1131				173	59145

Jumlah Tanah Wakaf Yang Sudah Bersertifikat Di Kecamatan Ngaliyan <sup>1</sup>

No	Peruntukan Wakaf Kel Podorejo	Wakif	Nadzir	Sertifikat		Akta Ikrar Wakaf	
				No	Tanggal	No	Tanggal
1	Masjid At Taqwa Dan pondok	Kambali	Kyai Rusdi	14	03-Feb-92	W3/24/09/1991	16-Sep-91
2	Pon Putri	Asmuni	Kyai Rusydi	12	03-Feb-92	W2/31/09/1991	16-Sep-91
3	MI Podorejo	Asmuni	Kyai Rusydi	26	03-Feb-92	W3/20/09/1991	16-Sep-91
4	Sekolah Al Ma'arif	Kambali	Kyai Rusydi	25	03-Feb-92	W2/23/09/1991	16-Sep-91
5	Mshl,Baitussalam	Reni	Kyai Rusydi	29	01-Sep-92	W2/16/09/1991	16-Sep-91
6	Mushola	Rosiyah	Kyai Rusydi	28	03-Feb-92	W2/16/09/1991	16-Sep-91
7	Maslahul Huda III	Kasroni	Kyai Rusydi	23	03-Feb-92	W2/28/09/1991	16-Sep-91
8	Mshl Al Barokah	Achdan	Kyai Rusydi	22	03-Sep-92	W3/26/09/1991	16-Sep-91
9	Mushola	Kumaidi	Kyai Rusydi	15	03-Feb-92	W3/01/09/1991	16-Sep-91
10	Mshl Al Hikmah	Musripah	Kyai Rusydi	21	03-Feb-92	W3/41/09/1991	16-Jul-91
11	Mshl Istiqomah	Suryadi	Kyai Rusydi	27	03-Feb-92	W2/14/09/1991	16-Sep-91
12	Mshl Mujahidin	Kasrin	Kyai Rusydi	20	03-Feb-92	W2/27/09/1991	16-Sep-91
13	Mshl Al Ittihadiyah	Suryadi	Kyai Rusydi	18	03-Feb-92	W3/19/01/1991	16-Sep-91
14	Mshl Bani Syukur	Djuma'i	Kyai Rusydi	17	03-Feb-92	W3/22/09/1991	
15	Mshl baitul Isza	Ngasi	Kyai Rusydi	8	03-Feb-92	W3/30/09/1991	16-Sep-91
16	Mshl baitul Isza	Karnadi	Kyai Rusydi	16	03-Feb-92	W3/18/09/1991	16-Sep-91
17	Masjid	Kemat		24	03-Feb-92		
18	Mshl Palir	Muhani	Kyai Rusydi	10	03-Feb-92	W3/15/09/1991	16-Sep-91
19	Mshl al Mujahirin	Ridwan	Kyai Rusydi	19	03-Feb-92	W3/17/09/1991	16-Sep-91
20	Mshl al Mujahidin	Siti Aminah	Sutekno	3	04-Mar-04		
21	Masjid	Muthohirin	Isro'i	1	04-Mar-04		01-Oct-99

No	Peruntukan wakaf	Wakif	Nadzir	Sertifikat		Akta Ikrar Wakaf	
				No	Tanggal	No	Tanggal
1	Masjid Al-Falah	Soehardjo	Drs. H. N.Mustam Aji	146	03-Dec-97	80/W.2/IX/1997	03-N0p-1997
2	Masjid Ar-Ridho	H. yuswar		1989	5-Jan-98	19/W.1/IX/1997	23-Sep-

<sup>1</sup> Data tanah wakaf yang sudah bersertifikat di kecamatan Ngaliyan di ambil pada bulan maret 2008.



							97
3	Musholla dan	Rudjito &		2031	5-Jan-98	23/W.3/IX/1997	16-Sep-97
	TPQ Al-Amin	Suharsono					
4	musholla Al-Huda	Sudarti Suroyo		2287	6-Jan-98	88/W.3/IX/1997	25-Nop-1997
5	Masjid Klampisan	H. Supariya	Drs. Mardliyo	1626	02-Okt-91	W2/52/09/1990	06-nop-1990
6	Madrasah Klampisan	Katidjah		1627	02-Okt-91	W2/53/09/1990	06-nop-1990
7	Musholla Baiturrahim	Pyujiono	Drs. H. N.Mustam Aji	2220	6-Jan-98	12/W.2/IX/97	22-Sep-97
8	Musholla Nurul Huda	Soepadi		1479	13-Des-97	46/X/97	01-Okt-1997
10	Masjid Miftahul Huda	Sa'idah		1389	13-Des-97	63/W.5/X/97	01-Okt-1997
11	Musholla Nurul Huda	Drs. H. N.Mustam Aji		1373	13-Des-97	15-W.3/IX/97	22-Sep-97
12	Musholla Al-Ikhlash	Zainuri		1693	24-Des-97	18/W.3/97	23-Sep-97
13	Musholla Al-Marom	Abdul halim		1343	13-Des-97	49/W.3/X/97	01-Okt-1997
14	Makam	Achmad Nasir	H. Achmad Nur	464	06-Des-97	84/W.3/IX/97	10-Nop-1997
15	Musholla Baitussalam	Sutirto	Drs. H. N.Mustam Aji	390	06-Des-97	52/W.3/X/97	01-Okt-1997
16	Musholla Al-Barokah	Broto		1253	13-Des-97	51/W.3/X/97	01-Okt-1997
17	Musholla At-Taubah	Kaswan Sodik		1210	13-Des-97	53/W.3/X/97	01-Okt-1997
18	Musholla An-Nur	Suwardi		2720	9-Jan-98	54/X/97	01-Okt-1997
19	Masjid At-Taubah	Edi Poerwanto,S.H		2876	17-Jan-98	67/W.3/X/97	01-Okt-1997
20	Masjid Al-Amin	Hj. Sri Djannah	Hawari	2127	6-Jan-98	07/W.3/IX/97	15-Sep-97
21	Masjid Al-Amin	Kamidah		2086	6-Jan-98	08/W.3/IX/97	11-Sep-97
22	Masjid Al-Ichsan	Marjuki	Drs. H. N.Mustam Aji	2784	6-Jan-98	1/W.3/IX/98	11-Sep-97
23	Musholla Al-Ihlas	Kalimi		2432	9-Jan-98	50/X/97	01-Okt-97
24	Musholla Bitul Muttaqin	Saliman		1839	5-Jan-98	11/W.2/IX/97	12-Sep-97
25	musholla Al-Hidayah	Muhyono		1725	5-Jan-98	48/1.c15/X/1997	01-Okt-97
26	Masjid jami' Nurul Islam	T.T. babah Deblong		1098	13-Des-97	25.W3./IX/97	24-Sep-97
27	Masjid As-Siroj	H. Suradji		1898	5-Jan-98	17/W.3/IX/97	23-Sep-97
28	Musholla	Supardi	Hawari	828	13-Des-97	90/W.3/XII/97	02-Des-97
29	masjid al-muttaqin	Drs. Sugeng Rahmat	M. Ashar	821	13-Des-97	21/W.3/IX/97	17-Sep-97
30	musholla Baitul Istighan	Jumar	Drs. H. N.Mustam Aji	743	13-Des-97	45/X/97	01-Okt-97
31	Masjid Attaqwa	Drs. H. N.Mustam Aji	Hawari	604	13-Des-97	09/W.3/1997	18-Sep-97
32	Masjid Sirojudin	Sudirman istinja'a	Drs. H. N.Mustam Aji	1591	21-Des-97	13/W.3/IX/97	22-Sep-97

33	Masjid Al-Huda	Hawari		924	13-Des-97	44/X/97	01-Okt-97
34	Masjid Al-Fatah	Drs. Iswoyo Wiryono	Drs. Iswoyo Wiryono	2764	9-Jan-98	28/W.3/IX/97	9-Sep-97
35	YPI Al-Fattah	Drs. Iswoyo Wiryono	Drs. Iswoyo Wiryono	2730	9-Jan-98	105/W.3/IX/1997	29-Sep-97
36	Masjid Al-Ihlas	Drs. H.Syafi'i	Drs. H. N.Mustam Aji	5142	06-Des-97		
37	Masjid	H. Moch Dalail	Agus Susanto	4	06-Des-03		27-Jul-03
	Kel Tambak Aji						
1	Masjid Al-Mustaghfi	Juwariyah	KH. Syaiful Hidayat	457	22-Sep-93	W2/26/09/90	22-okt-90
2	musholla	mukari		416	24-Okt-91	W2/25/09/90	22-Okt-90
3	Masjid al-Mustaghfirin	Surur		454	22-Sep-93	W2/22/09/90	22-Okt-90
4	Musholla Nurul huda	poliman	Abdul manan	8	5-Jan-94		
5	Kegiatan Agama Islam	Drs. Yakoep		560	24-Okt-91	W2./63/09/91	22-Okt-90
6	Musholla	H. Hasyim	K. Asikin	6	3-Jan-94	W2/19/09/92	04-Des-92
7	Masjid	H. A. Ahmadi	K. Abdul Manan	559	24-Okt-91	W2/05/09/90	22-Okt-90
8	Musholla Al-Barokah	Sariyah	KH. Syaiful Hidayat	41`9	24-Okt/91	W3/21/09/90	22-Okt-90
9	Musholla	Simin	Drs. Mardliyo	1877	26-Jul-93	W2/08/09/91	16-Sep-91
10	Musholla	Sukar		1874	26-Jul-93	W3/13/09/90	9-Sep-91
11	Musholla Miftahul Huda	A. Kemat		1875	26-Jul-93	W2/09/09/91	16-Sep-91
12	Masjid	H. A. Wahab	H. Marzuki	466	23-Okt-91	W3/36/09/90	22-Okt-90
13	Masjid Assolihin	Siti Kasbari	KH. Syaiful Hidayat	445	1-Apr-93	W3/59/09/91	16-Sep-91
14	Masjid Darus syukur	Sulikah	Drs. Matrdliyo	1844	4-Jan-93	W2/04/09/92	20-Jan-92
15	Musholla Al-Muin	H. Toha	H. Marzuki	468	23-Okt-91	W3/35/09/90	22-Okt-90
16	Madrasah Diniyah/TK Islam	Ambijan		480	13-Jan-92	W2/42/09/91	16-Sep-91
17	Masjid darus Salam	Kartiyah	K. Asikin	793	21-Okt-92	W2/61/09/91	27-Des-91
18	Musholla An-Nur	Siti Maimunah	H. Abdul Manan	420	12-Nop-96	W2/29/93	5-Mar-92
19	Langgar Al-Ihsan		Drs. Thohir Su'ady	3730	27-Feb-98		
20	Masjid Assholihin	Isa	KH. Syaiful Hidayat	2303	19-Jan-98		
21	TPQ Nurul Huda	H. Asnawi	H. Asnawi	1638	19-Jan-98		
22	Langgar Al-Maqosid	Fudholi	Al-Maqosid	1893	19-Jan-98		
23	Masjid Baitul Muttaqin		Drs. Thohir Su'ady	3704	27-Feb-98		
24	Masjid Baitul Muttaqin	Abduh	KH. Syaiful Hidayat	4210	10-Mar-98	W.3/30/97	23-Sep-97
25	Langgar Attaubah	Samlawi		1125	19-Jan-98		
26	Musholla Al-Muhtadin	Tasiman		4250	19-Jan-98		

27	Masjid Al-Mubarak	Paiman	Drs. H.A. Qoliby	691	16-Des-98		
28	Masjid/ Madrasah	Ismun M	Ismun	3722	27-Feb-98		
29	Langgar Baiturrahman	Narto Dinojo	Saiful H	655	16-Feb-97		
30	Musholla Al-Ihlas	Kasmi	Fadlan	4002	3-Mar-98		
31	Masjid Al-Asyiri	H. Sukaimi	H. Mukri	6	6-Jan-04		26-Jun-03
32	Madrasah Diniyah/TK Islam	Duchuwan	Juweni	2	30-Jun-00		29-Dec-99
33	Masjid Baitul Iman			3	21-Des-00		23-Sep-97
34	Langgar An-Ni'mah	Djoko	Sartono	1	20-Apr-00		10-Apr-00
35	langgar	Sati	Sudarto	4	3-Sep-01		17-Apr-01
36	Masjid	H. Abu	H. Abdul Manan	558	24-Okt-91		22-Okt-90
	Kel Kalipancur						
1	Musholla Nurussalam	Rambat Pramono	Muhadi	256	30-Mar-98		
2	Musholla Nurussalam	Supanut		597	30-Mar-98		
3	Masjid Baitul Muttaqin	Khoiruddin Abas		345	30-Mar-98		
4	Masjid Al-Falah	Mustofa,BA	Sutamto, BA	4	21-Jul-00		14-Mar-00
	Kel Gondoryo						
1	Masjid Baiturrahim	Sapuan	M. Lahuri	84	21-Sep-90	Mk.01/K-10/BA-03.2	27-Jan-90
2	Mausholla Baitul Muttaqin	Asman	M. Lahuri	104	10-Okt-91	W.2/65/K-10/91	3-Jun-91
3	Masjid Baitul Muttaqin	H. Kasnawi	H. Chudhori	564	30-Mar-98		29-Dec-97
4	Masjid Baitul Muttaqin	Sanimah		577	30-Mar-98		29-Dec-97
5	Masjid Baitul Muttaqin	Ngasemi		777	30-Mar-98		29-Dec-97
	Kel. Beringin						
1	Musholla Al-Ihlas	Mainah	KH. Syaeful Hidayat	413	24-Okt-91	W.2/24/09/90	22-Okt-90
2	Musholla Baitul Hawa	H. Rahisan		407	24-Okt-91	W.2/13/90	22-Okt-90
3	Musholla	Warsinah		421	29-Jan-92	W.2/07/09/91	16-Sep-91
4	Pondok Pesantren	A. Sopiyan		418	24-Okt-91	W.2/17/09/90	22-Okt-90
5	Masjid	Mainah		443	1-Apr-93	W.3/60/09/91	16-Sep-91
6	Masjid Istiqomah	Sami	M. Lahuri	110	19-Mar-92	W.2/91/K-10/91	25-Jul-91
7	Masjid Baituttaqwa	Tasno	Suhadi	2001	24-okt-91	W.2/69/K-10/91	3-Jun-91
8	Masjid Baiturrahim	Soepari	Iskak	2003	24-Okt-91	W.2/70/k-10/91	3-Jun-91
9	Langgar	Soepari	Suhadi	1824	31-Jan-90	Mk.01/K-10/BA.0.3.2/05	23-Jan-90
10	Langgar	Mukilik		1820	31-Jan-90	Mk.01/K-10/BA.0.3.2/056	23-Jan-90
11	Musholla	A. Soleh		1822	31-Jan-	Mk.01/K-	23-Jan-

					90	10/BA.03.2/053	90
12	Musholla Ijtihad	Gondo Utomo	Mulyono	1	18-Jan-05		29-Dec-03
13	Pon Madrasatul Qur'an		H. Soleh Mahalli	661	9-Feb-98	83/W2/Xi/97	9-Feb-98
14	Kuburan		H. Syaiful Hidayat	784	9-Feb-98	77/W.3/X/97	9-Feb-98
15	Pon Madrasatul Qur'an		H. Soleh Mahalli	663	9-Feb-98	82/W.3/XI/93	9-Feb-98
16	langgar Roudhotul Mutaalimin	parlan	M Lahuri	117	06-Dec-93		12-Nop-91
	Kel Wates						
1	Langgar Miftahul Mutaalimin	Sripah	M Lahuri	107	10-Okt-91	W2/63/K-10/91	3-Jun-91
2	musholla Attaqwa	Yatilah	M Lahuri	101	10-Okt-91	W2/64/K-10/91	3-Jun-91
3	Musholla Miftahul Huda	Sarpi	Maskaini	684	30-Mar-98		
4	MTs Darul Ulum	Sinah	Ahya'	705	30-Mar-98		
5	MI Darul Ulum	Karmani	Ahya'	704	30-Mar-98		
6	Yayasan Manbaul Ulum	Kamdanah	Toha hasan	1	7-Mar-03		25-Mei-02
7							
	Kel Wonosari						
1	Musholla Al-Ihlas	Yasin	Sufyan	852	11-Feb-92	W.3/39/09/91	16-Sep-91
2	musholla Baitus Surur	Surur	KH. Syaiful Hidayat	410	24-Okt-91	W.2/16/09/90	22-Okt-90
3	Mawsjid Muhajirin	H. Abdullah	K Humam Mukti	652	23-Okt-91	W.3/60/09/90	22-Okt-90
4	Musholla	Abu Mahsar		674	26-Dec-91	W3/15/09/91	22-Okt-90
5	Musholla	Simah		658	23-Okt-91	W2/62/09/90	22-Okt-90
6	musholla	Sumardjo	KH. Mahfud	372	10-Dec-91	W2/30/09/90	22-Okt-90
7	Musholla	Minwar		374	10-Dec-91	W3/31/09/90	22-Okt-90
8	Musholla	Abu Naim		366	23-Okt-91	W2/03/09/90	22-Okt-90
9	Musholla	Maskur		368	23-Okt-91	W2/27/09/90	22-Okt-90
10	Musholla Al-Huda		Humam Mukti Aziz	163	25-Jun-96	6/9/1992	5-Jun-92
11	Pendidikan Muhammadiyah	munawqar	H Nurul Anwar	1819	30-Mar-98		
12	Pendidikan Muhammadiyah			1835	3-Mar-98		
13	Pendidikan Muhammadiyah			1836	3-Mar-98		
14	Musholla	P. Syafi'i	H. Mahbub	183	24-Okt-96		30-Apr-96
15	Taman Kanak-Kanak	Sri Hidayati	M Muzamil	2	30-Jun-00		26-mei-00
16	Lembaga Pendidikan islam	Hj khoiriyah	H. Masduki	3	9-Mar-01		30-okt-00
17		Salasatun	Ahwan	4	25-Jul-01		23-Apr-01
18	Tempat Ibadah	Sri Hidayati	H. Muzamil	1	29-Apr-00		1-Mar-00
19	Masjid Muhajirin	H,. Abdullah	Humam	652	23-Okt-91		

			Mukti Aziz				
20	Musholla Mujahidin	Abu Khoiri		660	23-Okt-91		22-Okt-90
21	Musholla Abdullah	Abu Mahsar		674	26-Des-91		22-Okt-90

Keterangan Kode AKTA :

- a. W.1. Ikrar Wakaf
- b. W.2. Akta Ikrar Wakaf
- c. W.2a. Salinan Akta Ikrar Wakaf
- d. W.K. Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah
- e. W.D. Surat pendaftaran Tanah yang terjadi sebelum berlakunya P.P No 28 tahun 1977
- f. W.3. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
- g. W.3a. Salinan APAIW
- h. W.4. Daftar Akta Ikrar Wakaf
- i. W.4a. Daftar APAIW
- j. W.5. Surat Pengesahan Nadzir
- k. W.6. Buku catatat tentang keadaan tanah wakaf
- l. W.6a. buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf
- m. W.6b. Buku Catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf
- n. W.7. Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf

#### C. Faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikasi tanah wakaf

Ketika melakukan wawancara bersama Bpk Djarajat, beliau menyatakan bahwa :

Apakah program sertifikasi berjalan? Program yang selama ini di laksanakan di sini, ya dengan tetap memakai ketentuan yang ada yakni dari Depag. Bagaimanakah respon masyarakat? Masyarakat sangat antusias dalam melakukan sertifikasi, apakah yang menjadi kendala masyarakat dalam melakukan sertifikasi? Menurutnya dari masyarakat yang melakukan Ikrar Wakaf selama ini menyatakan bahwa masalah biaya sertifikasi menjadi kendala, dan kurangnya pemahaman masyarkat tentang sertifikasi, ya kalau saya selaku PPAIW memaklumi bahwa hal ini menyangkut organisasi.<sup>2</sup>

Ada dua faktor yang cukup mempengaruhi lancar atau tidaknya proses sertifikasi tanah wakaf yakni faktor pendukung dan faktor penghambat.

---

<sup>2</sup> Wawancara bersama Bp Djarajat

## 1. Faktor Pendukung

Dengan telah timbulnya pengertian masyarakat tentang proses dan biaya pesertifikatan tanah wakaf dan masih banyak lokasi yang harus diselesaikan perwakafannya. Inilah salah satu faktor yang mendukung proses sertifikasi berjalan dengan lancar. Selain itu sistem kekerabatan dan seringnya silaturahmi yang dilakukan antara KUA dengan para Ta'mir masjid, langgar dan sarana-sarana keagamaan masyarakat dapat memahami proses-proses menyelesaikan pensertifikatan tanah. Factor pendukung lainnya yang barangkali bisa menyelesaikan problem sertifikasi tanah di KUA Ngaliyan, seperti yang sudah ditegaskan sebelumnya adalah bertambahnya jumlah sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Ngaliyan. Hal ini ditambah dengan pemahaman petugas akan pentingnya membangun semangat profesionalisme diantara para pegawai KUA.

## 2. Faktor Penghambat

Selain ada faktor penunjang, tak bisa dinafikan juga hadirnya berbagai faktor yang menghambat lancarnya proses sertifikasi tanah ini. Diantaranya adalah:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf, sehingga masih banyak tempat-tempat ibadah yang belum diproses pensertifikatannya.
- b. Masih banyak tempat ibadah yang tanahnya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) maupun tanah milik PT Pengembang Perumahan, sehingga mengalami kesulitan untuk proses sertifikasi karena harus diadakan peningkatan haknya dan ini butuh waktu yang lama dan dana yang tinggi.
- c. Kurangnya komunikasi antara KUA dengan Masyarakat

## D. Kesadaran Hukum Masyarakat

### 1. Pengetahuan Hukum sertifikasi Tanah wakaf

Pengetahuan tentang suatu system hokum merupakan salah satu indicator dari kesadaran hokum. Untuk itu maka pada bagian ini akan dikemukakan tentang pengetahuan responden sekitar system hokum sertifikasi.

Tabel-1

Pertanyaan : Menurut saudara, apakah ketentuan tentang sertifikasi tanah wakaf diatur dalam peraturan tertulis ?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Ya, PP No 42 2006, UU No 41 2006	33,33
B. Tidak	29,63
C. Tidak tahu	37,04
Jumlah	100

Jumlah responden yang menyatakan bahwa sertifikasi diatur dalam peraturan tertulis adalah 33,33% responden, responden yang menjawab tidak 29,63% responden dan yang tidak tahu 37,04% responden.

Dari responden yang menyatakan mengetahui bahwa sertifikasi di atur dalam peraturan tertulis ketika di wawancarai menyatakan bahwa saya mengetahui bahwa sertifikasi tanah wakaf itu di atur dalam peraturan tertulis atau UU, akan tetapi saya kurang tahu pasal-pasal yang mengaturnya.

Bila dilihat dari tabel di atas ternyata responden yang menjawab secara tepat adalah 9 responden dari 27 responden.

Tabel-2

Pertanyaan : Sertifikasi tanah wakaf dilakukan berdasarkan apa ?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Bukti AIW dan Surat tanah	62,96
B. Surat-surat tanah tanpa bukti AIW	29,64
C. Tidak tahu	7,40
Jumlah	100

Responden yang menyatakan bahwa Dalam mensertifikasikan tanah wakaf berdasar pada AIW dan surat yang menyatakan keterangan tentang keberadaan tanah wakaf. responden yang berhasil diwawancarai ternyata sebagian besar atau 62,96 % (17) responden mengetahui hal tersebut, sedang yang hanya mengetahui surat-surat tanah tanpa AIW 29,64% (8) responden, sedang responden yang tidak tahu 7,40% (2) responden.

Dari sebagian responden ketika di Tanya mengenai bukti AIW, menyatakan bahwa Akta ikrar wakaf adalah surat atau pernyataan secara tertulis yang menyatakan

bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf, sedang surat tanah itu leter D (istilah dahulu)/ sertifikat tanah.

Bila dilihat dari tabel di atas ternyata responden yang menjawab secara tepat adalah 17 responden dari 27 responden.

Tabel-3

Pertanyaan : Menurut saudara, siapakah yang terlibat dalam ikrar wakaf ?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Wakif, nadzir, saksi, mauquf alaih, PPAIW	51,85
B. Jawaban A ditambah kepala desa dan camat	33,33
C. Tidak tahu	14,82
Jumlah	100

Responden yang dapat diwawancarai adalah 51,85% (14) responden menjawab wakif, nadzir, saksi, mauquf alaih, dan PPAIW merupakan yang terlibat dalam pembuatan Akta Ikrar wakaf. Sedang 33,33% (9) responden selain jawaban pada huruf A menambahi dengan kepala desa / Camat adalah yang terlibat dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Dan responden yang menyatakan tidak tahu 14,82% (4) responden.

Dari responden yang mengetahui seputar keterlibatan dalam ikrar wakaf rata menyatakan bahwa ;

- Wakif merupakan orang yang memiliki tanah wakaf.
- Nadzir merupakan orang yang di pasrahi/ di beri amanat untuk mengelola tanah wakaf
- Saksi merupakan orang yang di mengetahui keberadaan tanah wakaf tersebut.
- PPAIW merupakan petugas yang mencatat.
- Kepala desa/camat merupakan pejabat yang mengeluarkan atau memberi wewenang untuk mengeluarkan surat tentang keberadaan tanah.

Bila dilihat dari tabel di atas ternyata responden yang menjawab secara tepat adalah 9 responden dari 27 responden.

Tabel-4

Pertanyaan : Kemanakah saudara membuat akta ikrar wakaf ?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. KUA	88,88
B. PPAT	
C. Tidak tahu	11,12



Jumlah	100
--------	-----

Sebagian besar Responden menjawab KUA sebagai tempat pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Responden yang memilih KUA sebagai lembaga yang membuat akta ikrar wakaf ketika menyatakan bahwa karena KUA terdapat petugas yang mencatat akta ikrar wakaf maka KUA saya anggap sebagai rujukan dalam membuat Akta Ikrar wakaf.

Bila dilihat dari tabel di atas ternyata responden yang menjawab secara tepat adalah 24 responden dari 27 responden.

Berdasarkan data di atas maka dapat disusun suatu tabel gabungan sesuai dengan ketepatan jawaban responden. untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan hukum responden dalam sertifikasi tanah wakaf,

Tabel-5  
Pengetahuan Hukum Responden

Tabel	Jawaban responden
A. Tabel 1	9
B. Tabel 2	17
C. Tabel 3	9
D. Tabel 4	24
Jumlah	59

Dari tabel tersebut dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut . tingkat pengetahuan hukum responden dalam sertifikasi tanah wakaf adalah sebesar  $59 \times 27/100 = 15,93\%$ .

## 2. Pemahaman Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf

Pemahaman Hukum Tentang Ketentuan Sertifikasi Merupakan Indikator Kedua Dalam Kesadaran Hukum. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman responden tentang sertifikasi tanah wakaf, berikut pertanyaan yang diajukan :

Tabel-6

Pertanyaan : Ketentuan mengenai sertifikasi tanah wakaf sebaiknya tunduk pada apa ?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Perundang-undangan yang berlaku	33,33
B. Hukum islam	48,15
C. Tidak tahu	18,52
Jumlah	100

Responden yang memilih ketentuan mengenai sertifikasi tanah wakaf sebaiknya tunduk pada hukum Perundang-undangan yang berlaku adalah 33,33% (9) responden. Sedang yang menjawab hukum islam adalah 48,15% dan yang tidak tahu 18,52%.

Terbatas pada responden yang menjawab hukum islam ketika diwawancarai responden beralasan bahwa sertifikasi tanah wakaf harus tunduk pada hukum islam karena pada dasarnya hukum islam yang mengatur tentang perwakafan. Sedang responden yang menjawab perundang-undangan yang berlaku rata-rata beralasan bahwa karena sertifikasi tanah wakaf itu di atur dalam perundang-undangan, maka harus tunduk pada perundangan yang berlaku, namun ketika ditanyakan kembali mengenai pasal-pasal yang mengaturnya, responden tidak bisa menunjukkan pasal yang mengaturnya.

Dari tabel tersebut responden yang menjawab tepat adalah 9 responden dari 27 responden.

Tabel-7  
Pertanyaan : Bagaimanakah untuk mendapatkan bukti AIW ?  
N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Wakif datang ke KUA dan mengikrarkan tanah wakaf kepada nadzir dihadapan PPAIW serta 2 orang saksi dan surat tanah	44,44
B. Wakif datang ke KUA dan membawa surat-surat tanah	29,63
C. Tidak tahu	25,93
Jumlah	100

Responden yang dapat diwawancarai ternyata sebagian besar 12 (44,44%) responden menjawab dalam mendapatkan AIW adalah wakif membawa surat-surat tanah dan melaksanakan ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi.

Ketika diwawancarai mengenai keharusan wakif untuk datang ke KUA sebagian beralasan bahwa wakif harus datang karena wakif adalah orang yang melakukan ikrar wakaf. Sebagian lagi beralasan bahwa wakif tidak harus datang ke KUA karena dapat di gantikan dengan orang lain/ atau istilahnya dengan surat kuasa. Ketika responden yang menjawab jawaban b, beralasan bahwa wakif tidak melakukan ikrar wakaf lagi karena sudah pernah melakukan ikrar pada waktu lampau.

Dari 27 responden yang menjawab dalam mendapatkan AIW adalah wakif membawa surat-surat tanah adalah 8 (29,63% )Responden, dan yang tidak tahu sejumlah 7 (25,93%) responden.

Bila dilihat dari tabel di atas ternyata responden yang menjawab secara tepat adalah 12 responden dari 27 responden.

Tabel-8

Pertanyaan : Apakah ada syarat bagi wakif dan saksi dalam ikrar wakaf?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Ya, dewasa, islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta wakaf.	55,55
B. Ya, pemilik sah harta benda wakaf	37,04
C. Tidak tahu	7,41
Jumlah	100

Dari responden yang dapat diwawancarai sebagian besar 15 (55,55%) menjawab ya adanya syarat yang terlibat dalam Ikrar wakaf sebagaimana tabel-3 diatas. Dengan mencontohkan ketentuan Wakif dan saksi harus dewasa, islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf.

Responden yang diwawancarai menyatakan bahwa syarat-syarat itu harus di berlakukan pada saksi atau yang terlibat dalam ikrar wakaf, karena hokum islam dalam perwakafan itu telah di atur di dalamnya termasuk saksi.

Responden yang menjawab b, dalam angket ternyata ketika di wawancarai sebagian besar kurang memahami dari pertanyaan yang di berikan, sehingga jawabannya kurang sempurna. Namun dalam menjawab wawancara secara lisan sebagian besar menyatakan hal serupa bahwa syarat itu harus di berlakukan terhadap saksi atau yang terlibat dalam ikrar wakaf.

Responden yang menjawab pemilik harta wakaf sejumlah 10 (37.03%) responden, dan yang tidak tahu 2(7,41%) responden.

Bila dilihat dari tabel di atas ternyata responden yang menjawab secara tepat adalah 15 responden dari 27 responden.

Tabel-9

Pertanyaan : Selain membuat akta ikrar wakaf lembaga ( PPAIW ) tersebut melakukan apa ?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Meneliti syarat-syarat sesuai ketentuan dan mengesahkan setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan	44,44
B. Mengesahkan AIW setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan	25,93
C. Tidak tahu	29,63
Jumlah	100

Responden selain membuat akta ikrar wakaf PPAIW juga meneliti syarat-syarat sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang dipilihnya adalah 12(44,44%) responden.

Ketika responden di wawancarai mengenai tugas PPAIW selain membuat AIW, responden yang menjawab a pada tabel di atas sebagian besar menyatakan bahwa meneliti surat-surat tanah yang diwakafkan atau istilahnya surat leter D, kemudian memberi cap (stempel ) atau di sahkan.

Sedang responden yang menjawab b, menyatakan bahwa mengesahkan akta ikrar wakaf adalah 7(25,93%) dan yang tidak tahu 8(29,63%) responden.

Bila dilihat dari tabel di atas ternyata responden yang menjawab secara tepat adalah 12 responden dari 27 responden.

Berdasarkan data di atas maka dapat disusun suatu tabel gabungan sesuai dengan ketepatan jawaban responden. untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan hukum responden dalam sertifikasi tanah wakaf,

Tabel-10  
Pemahaman Hukum Responden

Tabel	Jawaban responden
A. Tabel 6	9
B. Tabel 7	12
C. Tabel 8	15
D. Tabel 9	12
Jumlah	48

Dari tabel tersebut dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut . tingkat pemahaman hukum responden dalam sertifikasi tanah wakaf adalah sebesar  $48 \times 27/100 = 12,96\%$ .

### 3. Sikap hukum responden tentang sertifikasi tanah wakaf

Sikap Terhadap Ketentauan Dalam Sertifikasi Merupakan Indikator Ketika Dalam Kesadaran Hukum, berikut merupakan pertanyaan yang di jadikan acuan untuk memperoleh informasi mengenai sikap responden.

Tabel-11

Pertanyaan : Jika saudara dalam membuat akta ikrar wakaf di tolak oleh PPAIW karena persyaratan tidak lengkap, bagaimana sikap saudara ?

N=27

Jawaban	Responden %
A. Menerima, karena sadar akan pentingnya syarat tersebut	55,56

B. Tidak menerima, karena syarat tersebut terlalu sulit didapatkan	25,93
C. Tidak menjawab	18,52
Jumlah	100

Sikap responden ketika ditanya seperti pertanyaan pada Tabel-11, yang menerima adalah 55,56% (15) responden dengan alasan bahwa responden sadar akan pentingnya syarat-syarat tersebut. Responden yang tidak menerima adalah 25,93% (7) responden dengan alasan syarat yang dibuat terlalu menyulitkannya. Sedang tidak menjawab adalah 18,52% (7) responden.

Tabel-12

Pertanyaan : Apakah saudara setuju bila dalam sertifikasi harus menunjukkan bukti Akta Ikrar Wakaf di samping surat tanah ?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Setuju	62,96
B. Kurang setuju	37,04
C. Tidak menjawab	
Jumlah	100

Responden yang menyatakan setuju ketika sertifikasi harus menunjukkan bukti AIW di samping surat tanah lainnya sejumlah 62,96% (17) responden. Yang menyatakan kurang setuju sejumlah 10(37,04%) responden dan responden yang tidak menjawab 0%. bila dilihat dari jawaban responden pada tabel-2 adalah 17 responden, maka responden konsisten pada jawabannya.

Tabel-13

Pertanyaan : Apakah saudara setuju terhadap orang yang terlibat terdapat Syarat-syarat ?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Setuju	59,26
B. Kurang setuju	29,63
C. Tidak Menjawab	11,11
Jumlah	100

Responden yang menjawab setuju adanya ketentuan-ketentuan terhadap yang terlibat dalam ikrar wakaf seperti pada tabel-13 adalah 59,26% (16) responden. Yang menjawab kurang setuju 8(29,63%) dan yang tidak menjawab 3(11,11%) responden

Bila dilihat tabel-3 diatas ternyata responden yang konsisten adalah 16 responden. Hal ini wajar karena 2 responden dari tabel-11 adalah responden yang menjawab kurang tepat dari tabel-3 di atas.

Tabel-14

Pertanyaan : Apakah saudara setuju, wakif harus datang dan berikrar kepada nadzir dihadapan PPAIW dan di saksi oleh saksi ?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Setuju, karena peraturan telah mengaturnya	62,96
B. Kurang setuju, karena tidak ada aturan dalam islam	25,93
C. Tidak menjawab	11,11
Jumlah	100,00

Responden yang menjawab bahwa wakif harus datang dan berikrar kepada nadzir dihadapan PPAIW dan Saksi adalah 62,96% (17) responden. Sedang yang menjawab kurang setuju karena responden beranggapan bahwa islam mengatur masalah sertifikasi 7(25,93%) responden, dan yang tidak menjawab 3(11,11%) responden.

Bila dilihat pada tabel-3 di atas yang menjawab tepat adalah 14 responden maka dikatakan bahwa sebagian besar responden konsisten pada tabel-3, meskipun pada tabel-14 yang menyatakan setuju terdapat 17 responden, pada dasarnya 3 responden merupakan yang memilih jawaban yang kurang tepat pada tabel-3 diatas.

Berdasarkan data di atas maka dapat disusun suatu tabel gabungan sesuai dengan ketepatan jawaban responden. untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan hukum responden dalam sertifikasi tanah wakaf,

Tabel-15

Konsistensi Sikap Hukum Responden

Tabel	Jawaban responden
A. Tabel 11	15
B. Tabel 12	17
C. Tabel 13	16
D. Tabel 14	17
Jumlah	65

Dari tabel tersebut dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut . tingkat sikap responden dalam sertifikasi tanah wakaf adalah sebesar  $65 \times 27/100 = 17,55\%$ .

#### 4. Pola Perikelakuan Hukum dalam sertifikasi tanah wakaf

Pola Perikelakuan Merupakan Indikator Keempat Dalam Kesadaran Hukum, untuk mengetahui pola perikelakuan responden maka pertanyaan sekitar sertifikasi diajukan.

Tabel-16

Pertanyaan : Apakah saudara sudah pernah melakukan Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW?

N=27

Jawaban	Proporsi %
A. Pernah	85,16
B. Belum pernah	11,11
C. Tidak Menjawab	3,72
Jumlah	100,00

Responden yang menyatakan pernah melakukan ikrar wakaf dihadapan PPAIW sejumlah 23(85,16%) responden, sedangkan yang belum pernah adalah 3(11,11%) responden dan tidak menjawab 1(3,72) responden.

Tabel-17

Pertanyaan : Apakah saudara pernah terlibat dalam ikrar wakaf ?

N=27

Jawaban	Responden %
A. Pernah	85,16
B. Belum pernah	11,11
C. Tidak Menjawab	3,72
Jumlah	100.00

Responden pernah terlibat dalam ikrar wakaf adalah 23(85,16%), yang belum pernah sejumlah 3(11,11%) responden dan yang tidak menjawab 1(3,72%). ketika di wawancara keterlibatan responden dalam hal ini adalah bervariasi.

Tabel-18

Pertanyaan : apakah saudara pernah membuat Akta Ikrar Wakaf di KUA ?

N=27

Jawaban	Responden %
A. Pernah	85,16
B. Belum pernah	11,11
C. Tidak Menjawab	3,72
Jumlah	100,00

Responden yang menyatakan pernah membuat AIW di KUA sejumlah 23(85,16%) responden, sedang yang belum pernah adalah 3(11,11%) responden dan yang tidak menjawab 1(3,72%) responden.

Responden yang di wawancara yang menyatakan pernah membuat AIW di KUA dengan alasan bahwa responden termasuk orang yang ditunjuk sebagai panitia sertifikasi tanah wakaf, sedang responden yang belum pernah beralasan bahwa pada waktu pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf merupakan sertifikasi secara masal atau kelompok, sehingga secara langsung belum pernah membuat AIW di KUA.

Berdasarkan data di atas maka dapat disusun suatu tabel gabungan sesuai dengan ketepatan jawaban responden. untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan hukum responden dalam sertifikasi tanah wakaf,

Tabel-19  
Pola perikelakuan Hukum Responden

Tabel	Jawaban responden
A. Tabel 16	23
B. Tabel 17	23
C. Tabel 18	23
Jumlah	69

Dari tabel tersebut dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut . tingkat pola perilaku responden dalam sertifikasi tanah wakaf adalah sebesar  $40 \times 27/100 = 18,63\%$ .



## Bab IV

ANALISA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM SERTIFIKASI  
TANAH WAKAF

## A. Analisa terhadap sertifikasi tanah wakaf di KUA Ngaliyan Kota Semarang

Analisis terhadap berjalannya sertifikasi ini akan coba penulis kaitkan dengan tiga hal yang cukup signifikan yakni, faktor pendukung dan penghambat, undang-undang dan implikasi praktis bagi masyarakat.

Seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi proses sertifikasi tanah, yakni pendorong dan penghambat. Faktor pendorong atau penunjang lancarnya proses sertifikasi tanah antara lain, adalah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat, sistem kekerabatan dan seringnya silaturahmi yang dilakukan antara KUA dengan para Ta'mir masjid, musholla atau langgar dan sarana-sarana keagamaan masyarakat dapat memahami proses-proses menyelesaikan pensertifikatan tanah.

Selain ada faktor penunjang tentu tidak bisa dinafikan banyak hal yang bisa menghambat lancarnya proses sertifikasi tanah ini. Diantaranya adalah masyarakat masih kesulitan membiayai sertifikasi tanah wakaf, masih adanya masyarakat yang kurang memahami pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Dari faktor yang mendukung maupun menghambat tentu harus dicarikan solusinya terutama faktor yang menghambat. hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari dua wilayah, masyarakat sendiri dan petugas KUA.

Pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat dalam hal sertifikasi tanah wakaf sangat di perlukan, maka perlu di sini ditekankan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai KUA dalam menangani masalah wakaf.

Pembinaan yang diberikan oleh KUA diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami proses sertifikasi itu berlangsung, sehingga hukum yang selama ini di buat benar-benar telah dapat di rasakan oleh masyarakat.

KUA dalam hal ini PPAIW bagaimanapun juga merupakan institusi formal yang salah satu kewenangannya adalah menangani masalah wakaf. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf tidak sepenuhnya berada di tangan KUA, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen yang terkait dengan persoalan wakaf yakni, *nadlir*, masyarakat dan KUA sendiri.<sup>1</sup>

Tugas yang cukup penting yang di emban KUA dalam konteks pelaksanaan sertifikasi wakaf ini. Yang pertama adalah tugas pengawasan. Tugas pengawasan ini dilakukan pada saat pelaksanaan praktek perwakafan mulai dari ikrar wakaf hingga keluarnya bukti sertifikat tanah wakaf.

Pengawasan yang selama ini di lakukan masih sebatas pada proses ikrar wakaf saja, sehingga kurang optimal dalam mengawasi jalannya sertifikasi tanah wakaf, Hal ini di sebabkan kurang proaktifnya petugas dengan masyarakat.

Tugas PPAIW bukan berarti sudah selesai pada tahap itu. Karena pada tahapan selanjutnya mereka memiliki tanggung jawab yang tak kalah pentingnya yakni mengawasi pendayagunaan tanah wakaf.

---

<sup>1</sup> Achmad Arief Budiman, *Peran KUA Dalam Pemberdayaan Perwakafan: Studi Kasus di Kota Semarang*, Penelitian Individual: IAIN Walisongo Semarang, 2005, hlm. 67.

Pengawasan dalam pengelolaan wakaf ini ditujukan kepada nadzir, agar dia bisa bertindak benar dan profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap tanah wakaf. Pengawasan terhadap tanah wakaf ini juga sangat terkait dengan hasil pengelolaan maupun substansi dari benda wakaf itu sendiri.<sup>2</sup>

Fungsi pengawasan ini sebenarnya dapat dikatakan tidak terlalu optimal. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pegawai KUA memahami bahwa tugas KUA sudah purna bila sertifikat sudah diberikan, Selain itu nadzir juga jarang sekali melakukan koordinasi dengan pihak KUA, sehingga komunikasi terputus setelah pembuatan sertifikat Akta Ikrar Wakaf selesai.<sup>3</sup>

Selain fungsi pengawasan KUA juga perlu mengembangkan pembinaan hukum kepada masyarakat, baik melalui majelis ta'lim atau pertemuan warga lainnya akan sangat membantu dalam proses memahami kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah sebagai jaminan hukum.

Juga akan sangat efektif jika ada semacam simulasi atau praktek pra ikrar wakaf. Karena dengan begitu, masyarakat akan memahami secara lebih detail mengenai hukum sertifikasi itu sendiri.

#### B. Analisa Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi, sisi yang satu merupakan suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang kedua merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Djarojat..

tertentu.<sup>4</sup> Dengan kesadaran hukum menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya manusia dan pada “kami”nya.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum individu dan menjadi pangkal dari kesadaran hukum masyarakat. Sehingga kesadaran hukum dapat dikatakan bahwa perasaan dan keyakinan hukum inilah yang merupakan inti dari kesadaran hukum. Bila perasaan dan keyakinan dari individu-individu itu membentuk menjadi satu dalam masyarakat, maka kesadaran hukum tersebut merupakan kesadaran hukum pada masyarakat.<sup>5</sup>

Pembedaan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat sangat perlu. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah ( J.J. Von Schmid 1965:63).<sup>6</sup>

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada yakni tentang nilai-nilai hukum dan bukan penilaian hukum terhadap suatu kejadian-kejadian yang kongkrit dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf tentunya harus dilihat dari beberapa aspek:

---

<sup>4</sup> John Z. Loudoe, S.H., *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hlm 163.

<sup>5</sup> Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1988, hlm 146-147.

<sup>6</sup> Dr. Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 1982, hlm 152.

## 1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan tentang suatu sistem hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang di atur oleh hukum. Hukum disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun sesuatu perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pengetahuan hukum tersebut erat juga kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undang-undangkan.

Pengetahuan responden seputar sistem hukum sertifikasi sebagaimana dijelaskan di bab III. Jumlah responden yang menyatakan bahwa sertifikasi diatur dalam peraturan tertulis adalah 33,33% (9) responden dari 27 responden.

Dari responden yang menyatakan mengetahui bahwa sertifikasi di atur dalam peraturan tertulis ketika di wawancarai menyatakan mengetahui bahwa sertifikasi tanah wakaf itu di atur dalam peraturan tertulis atau UU, akan tetapi responden kurang mengetahui tahu pasal-pasal yang mengaturnya. Menurut penulis hal ini adalah wajar karena responden tidak pernah secara nyata memperoleh informasi tentang hal tersebut.

Bila dilihat dalam peraturan tertulis dalam hal ini Undang-undang, secara umum di atur dalam UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 berisi tentang tata cara pembuatan AIW yakni pasal 28 sampai 39.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 2004 tentang wakaf, 2005

Responden yang menyatakan bahwa dalam mensertifikasikan tanah wakaf berdasar pada AIW dan surat yang menyatakan keterangan tentang keberadaan tanah wakaf. responden yang berhasil diwawancarai ternyata sebagian besar atau 62,96 % (17) responden mengetahui hal tersebut.

Sebagian responden ketika di wawancarai mengenai bukti AIW, menyatakan bahwa Akta ikrar wakaf adalah surat atau pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf, sedang surat tanah itu leter D (istilah dahulu)/ sertifikat tanah.

Bila dilihat dalam peraturan tertulis mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam mensertifikasikan tanah wakaf tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 pasal 38 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW, dan persyaratan-persyaratan lain yang menjelaskan tentang tanah yang diwakafkan tersebut.<sup>8</sup>

Adapun keterlibatan Wakif, nadzir, saksi, mauquf alaih, PPAIW, kepala desa dan Camat merupakan yang terlibat dalam pembuatan Akta Ikrar wakaf. Dari 27 responden yang mengetahui seputar keterlibatan dalam ikrar wakaf adalah 33,33% (9) responden.

Berdasar pada PP No 42 2006 pasal 34 (d ) bahwa AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, Nadzir, 2 orang saksi, dan atau mauquf alaih disahkan oleh PPAIW. Ini berarti wakif, Nadzir, saksi, dan PPAIW terlibat, kemudian berdasar pasal 35 ayat 3 bahwa kepala desa terlibat jikalau tidak ada yang memohon

---

<sup>8</sup> Ibid

pembuatan AIW, sedangkan camat dalam keterlibatan pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai persyaratan administrative sebagaimana pasal 38 ayat 2(b).<sup>9</sup>

Sebagian besar atau 24 responden dari 27 responden mengetahui bahwa KUA sebagai tempat pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Responden memilih KUA sebagai lembaga yang membuat akta ikrar wakaf.

Menurut penulis dengan berdasar pada Undang-undang No 41 2004 memang secara eksplisit tidak dicantumkan, akan tetapi bila dilihat dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 berkaitan dengan bahasan ini sesuai dengan pasal 37 ayat 1 bahwa PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan atau pejabat yang menyelenggarakan untuk itu. berdasar pasal ini, bahwa PPAIW itu ternyata KUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan dan PPAIW sebagai petugas, maka dapat disimpulkan bahwa tempat pembuatan Akta Ikrar Wakaf adalah KUA.<sup>10</sup> Sedang mengenai PPAT tidak salah kalau dilihat dari peraturan lain yakni PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 6 ayat 2 bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan di Bantu oleh PPAT.<sup>11</sup>

Menurut penulis pengetahuan responden tentang sertifikasi tanah wakaf di pengaruhi oleh hal-hal :

- a. Masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf.

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

b. Pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, umumnya hanya pada masyarakat yang melakukan tindakan hukum terhadap tanah wakaf.

c. Hukum Sertifikasi tanah berada pada posisi hukum perdata sehingga peranan hukum dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang di angkat.

## 2. Pemahaman Hukum

Pemahaman Hukum Tentang Ketentuan Sertifikasi Merupakan Indikator Kedua Dalam Kesadaran Hukum. Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang, mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

Dari 27 Responden yang memilih ketentuan mengenai sertifikasi tanah wakaf sebaiknya tunduk pada hukum Perundang-undangan yang berlaku adalah 33,33% (9) responden. Sedang yang menjawab hukum Islam adalah 48,15%.

Hukum islam dalam hal ini KHI (kompilasi hukum islam) sebagai rujukan dari Hukum sertifikasi, namun bukan berarti harus tunduk pada hukum islam sebagaimana responden pahami.

Menurut penulis dengan berdasar pada hukum Islam sebenarnya tidak ada yang mengatur masalah sertifikasi, tetapi hanya mengatur masalah material dari



hukum perwakafan. Dengan keluarnya UU N0 1 tahun 1991 tentang KHI yang menjadi buku induk dalam perwakafan bukan berarti hukum sertifikasi tanah wakaf itu tunduk pada hukum Islam. Karena kalau sertifikasi itu tunduk pada hukum Islam akan di hadapkan pada pandangan-pandangan yang berfariasi.

Kemudian Dalam mendapatkan AIW dengan berdasar pada undang-undang No 41 Tahun 2004 yakni pasal 21 ayat 1 bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, bila pasal ini dipahami bahwa AIW tidak bisa didapat bila belum melaksanakan ikrar wakaf, maka wakif yang tidak melaksanakan ikrar wakaf tidak dapat bukti AIW. Dalam pelaksanaan ikrar wakaf ini terdapat pada pasal 17 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang dinyatakan secara lisan. Kemudian pasal 19 juga menyebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau tanda bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Dari 27 responden 44,44% responden menyatakan hal tersebut, responden dalam hal ini memahaminya, pemahaman responden menurut penulis berdasar pada hukum islam.

Responden yang beranggapan bahwa AIW didapat tanpa Ikrar wakaf karena sudah dilakukan pada waktu perwakafan tapi tidak dihadapan PPAIW. Pada dasarnya AIW didapat setelah melakukan ikrar Wakaf kepada nadzir dihadapan PPAIW dan disertai saksi disamping surat-surat lainnya, meskipun ikrar wakaf sifatnya hanya pengulangan.

Sebagian besar responden 55,55% (15) menyatakan adanya syarat bagi yang terlibat dalam Ikrar wakaf. Dengan mencontohkan ketentuan Wakif dan saksi harus dewasa, Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf.

Bila dilihat dalam perundang-undangan yang berlaku ketentuan mengenai syarat saksi diatur pada pasal 20 UU No 41 2004 bahwa saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan dewasa, Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pasal 7 (a ) bahwa wakif meliputi perseorangan, dan pasal 8 ayat 1 bahwa wakif perseorangan sebagaimana pasal 7 (a ) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan ; dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Dalam UU No 41 tahun 2004 tersebut terdapat pada pasal 21 ayat 3 menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Akta Ikrar wakaf di atur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam PP tersebut yakni pasal 34b menyatakan bahwa PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.

Secara keseluruhan pemahaman hukum responden mengenai hukum sertifikasi tanah wakaf di pengaruhi hukum tidak tertulis yakni hukum Islam. Hal ini adalah wajar karena masyarakat sebagian besar beragama Islam.

### 3. Sikap Hukum Responden

Sikap Terhadap Ketentauan Dalam Sertifikasi Merupakan Indikator Ketiga Dalam Kesadaran Hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang

bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan-pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Kaitannya dengan sikap hukum Soerdjono Soekanto mengatakan, bahwa perlu adanya pembedaan sikap, sikap yang fundamental dan instrumental. Sikap fundamental merupakan sikap yang dilakukan secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya, sedang sikap instrumental merupakan sikap yang memperhitungkan keburukan dan kebaikan dari kaidah hukum.<sup>12</sup>

Sikap responden sebagian besar dipengaruhi oleh sikap instrumental. Instrumental merupakan sikap yang mempertimbangkan untung dan rugi suatu kaedah hukum.

#### 4. Pola Perikelakuan Hukum

Pola Prilaku merupakan indikator keempat dalam Kesadaran Hukum, Pola prilaku hukum merupakan setiap prilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.<sup>13</sup>

Pola ini merupakan yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Data sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngaliyan sampai pada bulan Maret 2008 177 lokasi tanah wakaf, Tanah yang sudah bersertifikat mencapai 173 lokasi, dan yang 4 lokasi baru proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

---

<sup>12</sup> Dr. Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm 244.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 247-248.

Bila dipandang kesadaran hukum masyarakat berpangkal pada pola perikelakuan hukum masyarakat maka, untuk saat sekarang ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Wilayah KUA Ngaliyan tinggi.

Peranan dan keterlibatan pemerintah memang sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Karena tanpa keterlibatan pemerintah, maka akan sulit bagi masyarakat untuk berkembang.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat berkaitan erat dengan empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perikelakuan hukum.

Sebagian besar masyarakat pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti isi peraturan tertulis yang mengatur tentang sertifikasi tanah wakaf, pengetahuan responden adalah berdasar pada hukum tidak tertulis yakni hukum islam yang selama ini di jadikan pedoman dalam perwakafan

Pemahaman hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf pada dasarnya juga tidak memahami, sebagian besar pemahaman responden berdasar pada hukum islam.

Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah wakaf di pengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf.
- b. Pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, umumnya hanya pada masyarakat yang melakukan tindakan hukum terhadap tanah wakaf.
- c. Hukum Sertifikasi tanah merupakan berada pada hukum perdata sehingga peranan huku dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang di angkat.

Sikap dan pola perikelakuan masyarakat dalam hal ini merupakan sikap dan pola perikelakuan yang berdasar pada hukum islam yang selama ini menjadi kebiasaan dalam

melakukan perbuatan. Dan disisi lain sikap dan pola perikelakuan responden merupakan sikap instrumental,. Instrumental merupakan sikap yang mempertimbangkan untung dan rugi suatu kaedah hukum.

## B. Rekomendasi

Setelah menyimak kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, di tampilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan Pola Perikelakuan Hukum masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf perlu di lakukan penelitian lanjutan.
2. Kesadaran masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf perlu mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga pembangunan hukum sebgaimana yang di cita-citakan akan terwujud.
3. Perlu di teliti lebih lanjut sejauhmana peranan yurisprudensi tentang sertifikasi tanah wakaf sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
4. Oleh karena adanya kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara intensif oleh kalangan hukum.

## C. Penutup

Demikian skripsi yang telah di susun oleh penulis, sebagai manusia biasa adanya kesalahan adalah keniscayaan, oleh karena itu, penulis berharap ada kritik yang membangun, atau mungkin dapat dilakukan penelitian ulang, karena penulis menyadari masih banyak kekurangan.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat berkaitan erat dengan empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perikelakuan hukum.

Sebagian besar masyarakat pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti isi peraturan tertulis yang mengatur tentang sertifikasi tanah wakaf, pengetahuan responden adalah berdasar pada hukum tidak tertulis yakni hukum islam yang selama ini di jadikan pedoman dalam perwakafan

Pemahaman hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf pada dasarnya juga tidak memahami, sebagian besar pemahaman responden berdasar pada hukum islam.

Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah wakaf di pengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf.
- b. Pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, umumnya hanya pada masyarakat yang melakukan tindakan hukum terhadap tanah wakaf.
- c. Hukum Sertifikasi tanah merupakan berada pada hukum perdata sehingga peranan huku dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang di angkat.

Sikap dan pola perikelakuan masyarakat dalam hal ini merupakan sikap dan pola perikelakuan yang berdasar pada hukum islam yang selama ini menjadi kebiasaan dalam

melakukan perbuatan. Dan disisi lain sikap dan pola perikelakuan responden merupakan sikap instrumental,. Instrumental merupakan sikap yang mempertimbangkan untung dan rugi suatu kaedah hukum.

## B. Rekomendasi

Setelah menyimak kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, di tampilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan Pola Perikelakuan Hukum masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf perlu di lakukan penelitian lanjutan.
2. Kesadaran masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf perlu mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga pembangunan hukum sebgaimana yang di cita-citakan akan terwujud.
3. Perlu di teliti lebih lanjut sejauhmana peranan yurisprudensi tentang sertifikasi tanah wakaf sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
4. Oleh karena adanya kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara intensif oleh kalangan hukum.

## C. Penutup

Demikian skripsi yang telah di susun oleh penulis, sebagai manusia biasa adanya kesalahan adalah keniscayaan, oleh karena itu, penulis berharap ada kritik yang membangun, atau mungkin dapat dilakukan penelitian ulang, karena penulis menyadari masih banyak kekurangan.